

ANALISA

Tahun V No. 8

AGUSTUS 1976

NON-ALIGNMENT



Tahun V, No. 8
AGUSTUS 1976

NON - ALIGNMENT

seri ANALISA



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Phone 56532/35

PENGANTAR PENERBIT

Hubungan internasional dewasa ini makin bertambah pelik, bukan saja materi permasalahannya bertambah rumit, tetapi juga pola hubungan yang ada mengalami perubahan dimensi dan bentuk. Hal ini menjadi lebih sulit dipecahkan karena walaupun dimensi dan bentuk serta materi permasalahan hubungan internasional telah mengalami perubahan, namun langkah-langkah dan pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut masih terpacu dan sangat dipengaruhi oleh tradisi dan pengalaman-pengalaman di masa lampau.

Salah satu organisasi atau forum yang terbentuk dalam usaha mencari jalan pemecahan permasalahan hubungan internasional mencapai suatu bentuk masyarakat dunia yang damai dan sejahtera adalah Forum Non-Alignment atau dikenal pula dengan istilah Non-Blok. Perkembangan Forum Non-Blok ini berjalan dengan relatif cepat ditinjau dari kuantitas keanggotaannya. Ia dapat dikatakan telah merupakan semacam "Mini PBB" dan bahkan lebih daripada itu, kalau Forum Persatuan Bangsa-Bangsa hanya dihadiri oleh perutusan pemerintah resmi negara-negara merdeka kecuali organisasi pembebasan Palestina, maka Forum Non-Alignment di samping dihadiri oleh berbagai perutusan negara-negara merdeka, ia juga dihadiri oleh perutusan organisasi-organisasi militan dari berbagai negara. Apakah hal ini merupakan suatu kemajuan ataukah justru merupakan suatu kemunduran, dalam pengertian menghambat percepatan ke arah tercapainya perdamaian dunia, memang merupakan suatu hal yang senantiasa masih dapat diperdebatkan.

Pada kesempatan penerbitan ANALISA kali ini, kami mengetengahkan dua tulisan sekitar "NON - ALIGNMENT", masing-masing ditulis oleh A.R. SUTOPO dengan judul "Non-Alignment dan Partisipasi Indonesia" serta Kirdi DIPOYUDO dengan judul "Suatu Tinjauan Atas Gerakan Non-Blok". Di samping itu untuk memberikan gambaran yang lebih mendasar, maka kami lampirkan pula beberapa dokumentasi sehubungan dengan perjalanan sejarah forum non-alignment dengan mengetengahkan Komunike Konperensi Asia Afrika tahun 1955 yang merupakan landasan utama ke arah terbentuknya Forum Non-Alignment dan Daftar Hadir negara-negara maupun organisasi-organisasi dalam Konperensi Tingkat Tinggi Non-Alignment dari sejak Beograd (1961) sampai dengan Kolombo (1976).

Semoga dengan penerbitan ini permasalahan di sekitar perkembangan Non-Alignment dapat lebih dipahami terutama dalam usaha mengadakan evaluasi atas kedudukan Indonesia sebagai salah satu pencetus gagasan lahirnya Non-Alignment.

Agustus 1976

C S I S

DAFTAR ISI

<i>Pengantar Penerbit</i>	iii
 <i>NON-ALIGNMENT DAN PARTISIPASI INDONESIA</i> <i>A.R. SOETOPO</i>	 1
 <i>SUATU TINJAUAN ATAS GERAKAN NON-BLOK</i> <i>Kirdi DIPOYUDO</i>	 25
 <i>Lampiran</i>	
 <i>I. Daftar Peserta Konperensi-konperensi Non-Alignment</i>	 37
<i>II. Communique of the Bandung Conference, April 18-24, 1955</i>	 42
<i>III. Kriteria Partisipasi dalam Konperensi Negara-negara Non-Blok Menurut Konperensi Pertama di Beograd 1961</i>	 53

NON-ALIGNMENT DAN PARTISIPASI INDONESIA

A.R. SUTOPO

Salah satu hal yang mengalasi kebijakan non-alignment ialah kenyataan bahwa dunia setelah Perang Dunia II terpolarisir dalam dua kubu yang saling bertentangan. Di antara daya tarik-menarik dari dua kubu inilah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaannya harus mempertahankan hidupnya, identitasnya dan berjuang untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan dan sasaran-sasarannya. Untuk menghindari konflik yang semakin tajam mereka tidak bergabung ke dalam salah satu blok/kubu, sebaliknya membentuk suatu forum agar secara bersama-sama dapat memberikan sumbangan yang positif bagi perdamaian dan kerjasama internasional di dalam prinsip hidup berdampingan secara damai, yaitu melalui forum non-alignment. Hingga kini forum non-alignment masih merupakan tempat berkumpul sebagian terbesar dari negara-negara yang sedang berkembang untuk membicarakan berbagai-bagai masalah.

Tetapi sistem internasional sendiri mengalami perkembangan yang cepat. Kalau pada waktu mulai diintrodusirnya kebijakan non-alignment ini sistem internasional disebut sebagai bipolar, maka dalam perkembangannya sistem itu telah berubah ke arah multipolar. Dengan demikian ada dimensi-dimensi baru yang perlu diperhitungkan dalam formulasi politik luar negeri suatu negara, apakah itu berupa dimensi politik, keamanan atau ekonomi. Demikian pula halnya bagi forum non-alignment, terjadinya perkembangan-perkembangan baru harus diperhitungkan agar tujuan yang diinginkan dapat terwujud.

Paling tidak semenjak Konperensi Puncak Negara-negara Non-aligned yang pertama di Beograd tahun 1961 telah terlihat adanya dua pemikiran di dalam forum non-alignment.¹ Pemikiran yang pertama ialah dari negara-negara yang mengharapkan agar konperensi menilai situasi dunia .. secara réalistis dan memberikan sumbangan dalam mencari jalan dan sarana untuk mengajak negara-negara besar memelihara perdamaian dunia. Pemikiran kedua adalah dari negara-negara yang menganut garis radikal militan dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Hingga kini adanya dua pemikiran tersebut masih terlihat setiap kali diselenggarakan Konperensi negara-negara non-aligned.

Oleh karena itu dirasa penting untuk memikirkan kembali, pada saat ini, peranan forum non-alignment dalam usahanya memberikan sumbangan yang positif dan bermanfaat bagi umat manusia. Tulisan ini dimaksudkan untuk merangsang ke arah pemikiran-pemikiran tersebut, khususnya tentang kedudukan Indonesia di dalam forum non-alignment. Apakah dengan terjadinya perkembangan-perkembangan dewasa ini khususnya, forum non-alignment masih relevan dan berguna bagi Indonesia?

ARTI NON-ALIGNMENT SEBAGAI KEBIJAKAN

Khususnya pada masa-masa yang lalu orang sering mengacaukan pengertian non-alignment dengan netralitas atau netralisasi. Dalam suatu hal memang terdapat persamaan-persamaan antara pengertian-pengertian tersebut, yaitu dalam hal orientasi politik luar negeri, di mana suatu negara tidak akan mengikatkan kekuatan militer dan diplomatiknya pada tujuan atau maksud-maksud dari negara lain. Kalau kita hanya melihat pada ciri tersebut, khususnya dalam hal ikatan militer, maka tidak terlalu mengherankan kalau terjadi kekacauan pengertian antara non-alignment, netralitas dan netralisasi. Akan tetapi

¹ Hingga sekarang dalam forum non-alignment masih terdapat negara-negara yang ingin menitik-beratkan agar forum ini lebih banyak memperhatikan masalah-masalah politik, sementara itu terdapat banyak negara yang mulai mencurahkan perhatiannya lebih banyak dalam bidang ekonomi. Lihat Leo Mates: Non-alignment, Theory and Current Policy, (The Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 1972) hal. 366.

ketidak-mauan suatu negara untuk mengikatkan kekuatan militernya pada negara lain atau pada maksud-maksud dan tujuan negara lain mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dari segi yang demikian inilah akan didapatkan perbedaan pengertian dari ketiga istilah tersebut.

Pada dasarnya netralitas menunjukkan status hukum dari suatu negara selama terjadinya perang atau permusuhan bersenjata.¹ Menurut hukum internasional mengenai netralitas, suatu negara yang tidak terlibat dalam perang mempunyai sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu untuk tidak melibatkan diri pada pihak-pihak yang saling bermusuhan. Misalnya dapat disebutkan kewajiban untuk tidak memberi izin kepada salah satu pihak yang sedang berperang mempergunakan wilayahnya bagi operasi-operasi militer, atau memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung perlengkapan militer kepada pihak-pihak yang berperang. Di antara hak-haknya antara lain dapat disebutkan kebebasan berlayar bagi kapal-kapalnya di laut terbuka dan dalam batas-batas tertentu berhak mengadakan transaksi dengan negara-negara atau pihak-pihak yang terlibat dalam perang.

Netralisasi atau negara yang dinetralisir adalah suatu negara, di samping hak-hak dan kewajiban-kewajibannya seperti negara netral, yang kemerdekaan dan integritas wilayahnya dijamin oleh negara-negara besar berdasarkan pada suatu perjanjian internasional. Perbedaannya dengan netralitas ialah kalau netralitas hanya berlaku selama perang, maka netralisasi berlaku juga dalam masa-masa damai. Di samping itu di dalam status netralitas kesempatan untuk mengadakan/membuat aliansi militer dengan negara lain yang tidak terlibat di dalam perang masih terbuka, sedangkan dalam netralisasi keadaan yang demikian itu dilarang baik dalam masa perang maupun dalam masa damai.

Non-alignment mempunyai pengertian yang berbeda dengan kedua pengertian tersebut di atas. Dunia setelah Perang Dunia II dikuasai oleh suasana perang-dingin, yaitu suatu keadaan yang timbul karena persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur untuk saling berebut pengaruh. Menjadi

¹K.J. Holsti; *International Politics, A Framework for Analysis*, (Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1972) hal. 106-107 memberikan sedikit gambaran singkat mengenai perbedaan antara negara netral dan negara yang dinetralisir.

anggapan umum bahwa periode perang dingin menggambarkan pola hubungan alam ideologi Demokrasi di satu pihak dan Komunisme di lain pihak. Dalam periode tersebut praktis kedua blok ini menjadi "pusat" baik dalam lapangan ideologi, militer, ekonomi maupun diplomatik. Dengan demikian negara-negara Asia dan Afrika yang umumnya baru saja merdeka berada dalam posisi yang terjepit, dalam pengertian bahwa mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sangat berpengaruh tersebut. Kenyataan itu harus dihadapi oleh negara-negara tersebut dalam rangka menghadapi masalah-masalah keamanan hingga pembangunan ekonominya. Apakah yang harus mereka lakukan dalam menghadapi realitas-realitas tersebut, bergabung dengan salah satu pihak dalam aliansi-aliansinya, isolasi atau tetap berdiri sendiri dengan segala risikonya? Dalam menghadapi kondisi-kondisi tersebut sejumlah negara-negara, yang umumnya adalah negara-negara yang sedang berkembang, memilih kebijakan non-alignment.

Tidak semua negara yang menganut kebijakan non-alignment mempunyai rumusan yang sama antara satu dengan lainnya, ada yang menyebutnya sebagai active independence, non-identification, policy of active neutrality, positive neutralism dan sebagainya.¹ Tetapi pada intinya mereka menghendaki suatu politik luar negeri yang tidak terikat oleh salah satu pihak dari super-powers dalam maksud-maksud dan tujuannya. Leo Mates memberikan definisi non-alignment sebagai "a policy strictly based on independence, conducted by states which experience a strong feeling of insecurity but are not able to cope with events in their environment".² Kebijakan tersebut ditempuh dalam mencari dan menentukan identitasnya sendiri dengan tidak mengadakan ikatan-ikatan dengan salah satu blok, yang dipilihnya atas dasar inisiatifnya sendiri dan tidak mendapatkan jaminan dari negara-negara besar atau blok tersebut.

¹ Cecil V Ceabb Jr.; The Elephants and the Grass, A Study of Non-alignment, (Frederick A Praeger, New York, 1966) hal. 3-6.

² Leo Mates, Op. cit., hal. 108.

Mereka menjalankan kebijakan tersebut dengan tidak melibatkan diri atau turut terlibat dalam konflik-konflik negara-negara besar khususnya dalam bentuk ikatan-ikatan militer yang telah dibentuk oleh masing-masing negara besar. Demikian pula halnya dalam segi diplomasi, mereka menolak untuk memihak terus menerus pada salah satu blok dalam segala masalah. Barangkali dalam satu masalah mereka akan memberikan dukungan diplomatik kepada Blok Barat misalnya, sedangkan dalam masalah lainnya barangkali mereka akan memberikan dukungan kepada Blok Timur.

MOTIVASI-MOTIVASINYA

Kebijakan non-alignment yang dianut oleh banyak negara itu merupakan pertanda bahwa dalam konteks sistem internasional yang bipolar masih terdapat negara-negara yang menginginkan bertindak secara independen yang merupakan cetusan jawaban dari pembentukan dua kubu yang saling bermusuhan tersebut. Atau berbicara lebih luas lagi, dalam hubungan antar negara-negara prinsip kemerdekaan pada pilihannya sendiri merupakan pegangannya dengan pertimbangan adanya faktor-faktor pembatas.

Persoalannya sekarang ialah bagaimana sikap atau tindakan suatu negara non-aligned yang ingin turut serta ambil bagian dalam menghadapi masalah-masalah internasional dan di dalam menghadapi masalah-masalahnya sendiri, seperti kepentingan di dalam negerinya dan sasaran-sasaran yang hendak diwujudkan/dicapai? Dalam masalah-masalah internasional yang sifatnya global atau masalah-masalah umum biasanya negara-negara non-aligned dapat menunjukkan sikap yang sama, misalnya dalam masalah-masalah dekolonisasi, kemerdekaan, imperialisme dan aliansi militer. Tetapi dalam masalah-masalah yang menyangkut pada atau berhubungan dengan kepentingan nasional dan sasaran-sasaran yang akan diwujudkan secara langsung, terdapat perbedaan-perbedaan sikap di antara mereka, bahkan dapat terjadi konflik dengan negara-negara lainnya. Sebagai contoh misalnya hubungan yang dekat dengan salah satu blok atau super-powers antara negara yang satu dan lainnya terdapat perbedaan-perbedaan seperti banyak ditunjukkan oleh negara-negara Asia dan Afrika khususnya baik pada masa lampau maupun pada saat ini.

Terjadinya perbedaan sikap dan tindakan dari negara-negara non-aligned disebabkan oleh adanya perbedaan dalam motivasi masing-masing di dalam menjalankan kebijakan non-alignment, di mana realisasi dari motivasi tersebut dapat diperoleh baik dari Barat (Amerika Serikat) maupun dari Timur (Uni Soviet). Misalnya dalam hal pembangunan angkatan bersenjata, suatu negara dapat mencari sumber-sumber bantuan baik dalam bentuk persenjataan, teknis-teknisi maupun pelatih-pelatih yang dibutuhkan baik dari negara-negara Barat maupun Timur. Demikian juga halnya dalam bidang-bidang lain dapat dikatakan hal yang serupa dapat terjadi. Cecil V Crabb Jr. menyebutkan bahwa motivasi ditempuhnya kebijakan non-alignment pada umumnya adalah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan di dalam bidang-bidang ideologi, ekonomi, militer dan diplomatik.¹

Dalam motif ideologi dapat disebutkan Yugoslavia yang merupakan negara komunis tetapi tidak mengikatkan diri pada Uni Soviet dan sekutunya, sedang India, khususnya dalam jamannya Nehru, yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya tidak mengikatkan diri pada Barat. Dua contoh yang kontras ini menunjukkan bahwa negara-negara non-aligned berusaha untuk memiliki identitasnya sendiri. Motif ekonomi menunjukkan pada pemenuhan akan kebutuhan dalam pembangunannya. Kekurangan modal, masih terbelakang dan ketinggalan dalam teknologi merupakan beberapa ciri yang dimiliki oleh negara-negara non-aligned. Hingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka dapat mendatangkannya baik dari Barat maupun dari Timur berdasarkan pada persepsi mereka masing-masing. Demikian pula dalam motivasi militer/keamanan terdapat variasi dalam hubungan mereka dengan negara-negara besar atas pertimbangan dan persepsi keamanan mereka. Dalam bidang diplomatik mereka tidak mengikatkan diri atau membentuk aliansi diplomatik dengan salah satu blok misalnya dalam forum-forum atau lembaga-lembaga internasional. Tetapi dalam bidang ini terdapat semacam koinsidensi dengan Uni Soviet dalam hal anti kolonialisme dan imperialisme karena latar belakang negara-negara non-aligned, dan yang mendapat tuduhan sebagai kolonialis dan imperialis pada umumnya adalah negara-negara Barat (Perancis, Inggris, AS, Portugal).

¹ Cecil V Crabb Jr., *op. cit.*, hal. 26-38

Sedang motivasi yang mendorong mereka untuk membentuk suatu forum ialah keinginan mereka untuk memberikan sumbangan yang positif bagi terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional dalam menghadapi masalah-masalah internasional serta kerjasama damai antar bangsa-bangsa di dunia.¹ Kesadaran akan adanya ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional baik yang disebabkan oleh konflik-konflik antar negara-negara besar maupun antar negara-negara kecil yang dapat membahayakan keamanan internasional mendorong beberapa negara untuk memelopori pembicaraan antar negara-negara yang berhaluan non-alignment dalam suatu forum.

Selanjutnya dalam Konperensi Puncak Lusaka motivasi ini ditegaskan kembali dalam deklarasinya mengenai perdamaian, kemerdekaan, pembangunan, kerjasama dan demokratisasi hubungan internasional (Lusaka Declaration on Peace, Independence, Development, Co-operation and Democratization of International Relations). Ditegaskan bahwa peranan yang diharapkan oleh negara-negara non-aligned menurut deklarasi ini antara lain adalah dalam memelihara dan memperkuat perdamaian dan keamanan dunia, menjamin kemerdekaan nasional dan kedaulatan penuh dari semua bangsa atas dasar kesederajatan dan hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, menyokong (promoting) pertumbuhan ekonomi yang cepat dari negara-negara yang sedang berkembang dan "considering possibilities for greater consultation and co-operation" di antara negara-negara non-aligned serta memperkuat PBB.

NON-ALIGNMENT SEMENJAK BEOGRAD 1961

Pada bulan September 1961 diadakan suatu Konperensi Puncak dari Negara-negara non-aligned untuk pertama kalinya di Beograd, Yugoslavia. Seperti disebutkan sebelumnya, negara-negara ini ingin memberikan sumbangan yang positif lagi keamanan dan perdamaian dunia, dan karena itu forum non-alignment ini merupakan tempat "bertukar pikiran" dalam menanggapi masalah-masalah internasional. Yang hadir dalam konperensi tersebut adalah 25 negara anggota.

¹ Deklarasi Kepala-kepala negara atau Pemerintahan Negara-negara Non-aligned di Beograd, 1961 (dalam Leo Mates, *op.cit.*, hal. 387).

Ternyata forum non-alignment ini makin lama makin banyak mendapatkan perhatian negara-negara yang ingin berpartisipasi dilihat dari jumlah negara yang mengikuti konperensi-konperensi berikutnya. Kalau dalam Konperensi Beograd anggotanya baru 25 negara, dalam konperensi Puncak di Kairo tahun 1964 telah mencapai 47 negara anggota (penuh). Perkembangan keanggotaan terus terjadi seperti terlihat dalam Konperensi Lusaka menjadi 53 anggota, Konperensi Aljazair bertambah menjadi 76 negara dan dalam Konperensi Kolombo 1976 keanggotaan dalam forum non-alignment telah mencapai 85 negara. Hanya dalam jangka waktu 15 tahun keanggotaan forum ini telah mencapai lebih dari tiga kali lipat.

Dari sejarahnya, forum non-alignment merupakan suatu reaksi terhadap situasi dunia yang dikuasai oleh perang dingin. Untuk mencegah forum non-alignment terlibat dalam konflik-konflik perang dingin maka dalam Konperensi Beograd telah ditentukan kesepakatan bahwa negara-negara yang dapat diterima sebagai anggota adalah negara-negara yang antara lain harus menganut landasan politik luar negeri yang bebas atas dasar koeksistensi damai tanpa melihat pada perbedaan di dalam sistem politik dan sosialnya, bukan anggota persekutuan militer multilateral dalam konteks konflik negara-negara besar, mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan dan pembebasan dari kolonialisme dan imperialisme.

Memang disadari bahwa pada waktu itu masalah perdamaian dan keamanan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan perjuangan dari daerah-daerah yang terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya merupakan masalah yang sangat aktual dan mendesak. Itulah sebabnya mengapa Konperensi Beograd menekankan azas kemerdekaan dan hidup berdampingan secara damai di antara bangsa-bangsa sebagai prinsip dari hubungan internasional. Sedangkan bidang ekonomi walaupun dalam konperensi ini telah disebut-sebut, belum mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari para peserta.

Dalam konperensi-konperensi selanjutnya, yaitu mulai dari konperensi Kairo 1964, terlihat kecenderungan semakin besarnya perhatian yang diberikan pada masalah-masalah ekonomi di samping pembicaraan mengenai masalah-masalah politik. Resolusi dan deklarasi-deklarasi dalam bidang ekonomi, dukungan yang diberikan kepada Kelompok 77 dan UNCTAD semakin mendapatkan tempat dalam forum non-alignment. Namun walaupun sudah terdapat

resolusi dan deklarasi ekonomi untuk kemajuan negara-negara yang sedang berkembang (sedang membangun), realisasinya ternyata sangat sulit, baik dalam hal bantuan, perdagangan maupun kerjasama ekonomi regional.

Sementara itu dalam tubuh forum non-alignment sendiri terdapat negara-negara yang berhaluan radikal di satu pihak dan negara-negara yang berhaluan moderat di lain pihak. Kelompok negara-negara radikal menghendaki adanya suatu perjuangan yang frontal dalam menghadapi masalah-masalah kolonialisme, imperialisme dan ketidak-adilan, serta menjadikan blok Barat (Amerika Serikat khususnya) sebagai target sasaran mereka. Sedangkan kelompok moderat menghendaki adanya prinsip hidup berdampingan secara damai di antara negara-negara di dalam memecahkan masalah-masalah internasional. Atau dengan kata lain, dalam forum non-alignment telah terdapat dua konsep pendekatan dalam menangani masalah-masalah internasional dalam rangka sumbangannya bagi perdamaian dan keamanan internasional dan kerjasama antara bangsa-bangsa.

KONDISI INTERNASIONAL SAAT INI

Untuk menilai peranan forum non-alignment dewasa ini maka harus diperhitungkan terjadinya perubahan-perubahan dalam hubungan internasional semenjak dasawarsa 1960-an. Pertama, masalah ideologi yang membawa ke arah konfrontasi antara Barat dan Timur nampaknya semakin hari semakin mereda, kalau tidak dapat dikatakan telah berlalu. Demikian pula bahaya perang nuklir semakin berkurang karena adanya detente antar negara-negara besar. Munculnya unsur-unsur baru dalam sistem internasional menyebabkan bipolarisme dunia semakin mengendor. Memang dalam beberapa hal masih dapat disebutkan adanya bipolarisme, seperti dalam keunggulan persenjataan, kemajuan teknologi ruang angkasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tetapi perkembangan peranan ekonomi dalam hubungan-hubungan internasional dan bertambahnya unsur-unsur baru dalam politik internasional yang mempengaruhi konfigurasi kekuatan dan pengaruh menyebabkan beralihnya sistem internasional dari bipolar kepada sistem multipolar.¹

¹ Richard Rosecrane; *International Relations, Peace or War?*, (McGraw-Hill Book Company, New York, 1973) hal. 273-282

Tampilnya sistem multipolar ini semakin mengurangi pilihan terhadap alternatif untuk mengadakan aliansi hanya di sekeliling dua kekuatan saja. Untuk merealisasikan sasaran-sasarannya, justru dalam sistem internasional yang demikian ini (multipolar) suatu negara mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam mencari sumber-sumber yang dibutuhkannya. Tinggalah sekarang bagaimana persyaratan yang diberikannya sendiri dan persyaratan dari negara besar diakomodasikan dalam perundingan mereka.

Kedua, perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa masalah-masalah kolonialisme dan imperialisme boleh dikatakan hanya tinggal sebagai sisa-sisa dari masa lampau saja. Dalam dasawarsa 1960-an telah banyak daerah-daerah jajahan khususnya di Afrika yang telah memperoleh kemerdekaannya baik melalui perjuangan bersenjata maupun melalui proses dekolonisasi dari bekas penjajahnya. Dengan demikian pemikiran tentang kemerdekaan bangsa-bangsa seperti yang tersurat dalam "gerakan kemerdekaan dan perjuangan-perjuangan pembebasan" merupakan sesuatu yang tidak lagi sepenting limabelas tahun yang silam. Tetapi ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengingkari kenyataan masih terdapatnya sisa-sisa kolonialisme dan imperialisme hingga saat ini.

Persoalan yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang, pada umumnya pada saat ini ialah adanya hubungan-hubungan yang tidak sederajat antar bangsa-bangsa walaupun dalam kenyataannya mereka adalah negara-negara yang merdeka. Dengan lain perkataan persoalan yang sekarang dihadapi ialah tentang demokratisasi di dalam hubungan-hubungan internasional.¹ Hubungan ini terjadi khususnya antara negara-negara besar yang menginginkan untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara-negara yang lebih kecil di satu pihak dan negara-negara kecil yang menginginkan kemerdekaan di dalam menentukan nasibnya sendiri di lain pihak. Di dalam pengertian yang demikian ini kiranya kemerdekaan tetap memiliki esensi penting dalam kehidupan negara-negara merdeka.

¹ Deklarasi Konperensi Kairo tahun 1964 telah mulai menyinggung masalah ketimpangan hubungan internasional. Deklarasi Lusaka tahun 1970 mengemukakan masalah tersebut lebih jelas lagi, (lihat dalam Lusaka Declaration on Peace, Independence, Development, Cooperation and Democratization of International Relations), dalam Resolusi I.

Ketiga, berhubungan dengan kriteria bagi keanggotaan dalam forum non-alignment sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa negara-negara yang menganut strategi non-alignment memiliki perbedaan-perbedaan di dalam sistem politik dan sosialnya, dan dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh masing-masing negara digunakan cara yang berbeda antara negara yang satu dan negara lainnya. Hal itu diakui oleh forum non-alignment bukanlah merupakan penghalang bagi kerjasama antara bangsa-bangsa. Dengan terjadinya perkembangan-perkembangan baru kriteria ada atau tidaknya aliansi militer atau ikatan-ikatan militer perlu mendapatkan peninjauan kembali. Untuk tujuan apa ikatan militer itu dibuat dan sampai seberapa jauh hal itu membatasi independensi politik luar negeri suatu negara? Ini perlu ditegaskan kembali karena dalam perkembangannya justru terdapat negara yang telah masuk forum non-alignment tetapi yang di dalam orientasi politik luar negerinya kelihatannya hanya memihak kepada salah satu blok saja walaupun tidak memiliki ikatan-ikatan militer seperti disebutkan di atas. Dengan demikian terbukalah forum non-alignment sebagai saluran kepentingan dari negara-negara besar, entah itu Amerika Serikat, Uni Soviet maupun RRC. Merupakan pertanyaan bagi identitas non-alignment sendiri: Bagaimana sebenarnya non-alignment itu?

Keempat, hubungan internasional dewasa ini menunjukkan semakin penting dan meningkatnya peranan masalah-masalah ekonomi, baik dalam bentuk perdagangan, kerjasama ekonomi untuk pembangunan, distribusi sumber-sumber dan lain-lain. Kalau dalam periode perang dingin isu yang besar dalam masalah-masalah internasional dihubungkan dengan konflik Barat dan Timur, maka salah satu isu dalam masalah-masalah internasional sekarang ialah polarisasi dunia antara negara-negara maju/kaya di satu pihak dan negara-negara sedang berkembang (membangun) yang umumnya miskin di lain pihak. Kalau dulu polarisasi Barat dengan Timur, maka sekarang polarisasi Utara yang menunjukkan kepada negara-negara maju/kaya dengan Selatan untuk negara-negara sedang membangun dan miskin. Utara adalah negara-negara industri sedang Selatan adalah negara-negara agraris atau negara-negara penghasil komoditi-komoditi yang pasarannya adalah di negara-negara industri.

Kecenderungan yang ditunjukkan ialah bahwa jurang antara negara-negara maju yang kaya dan negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya semakin lama semakin dalam. Negara-negara yang maju kelihatan semakin bergerak maju terus sedangkan negara-negara yang sedang membangun kelihatannya lambat sekali dalam kemajuannya untuk mengejar jarak atau menjembatani jurang tersebut.

Tetapi di balik perbedaan yang sangat menyolok itu sebenarnya terdapat kondisi yang saling melengkapi kebutuhan antara negara yang satu dan negara lainnya. Bahwa pada umumnya negara-negara di dunia ini tidak dapat betul-betul disebut sebagai self-sufficient, maka prinsip saling ketergantungan merupakan alternatif di dalam memenuhi kebutuhannya. Saling ketergantungan berarti harus ada suatu mekanisme yang mengatur pola-pola hubungan mereka agar supaya tidak hanya menguntungkan bagi salah satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya. Sedangkan mekanisme yang mengatur tersebut dalam pembentukannya tidak boleh tidak harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan di dalamnya. Ini berarti bahwa untuk membentuk suatu mekanisme yang adil bagi negara-negara yang kaya dan yang miskin, kedua belah pihak harus membicarakannya bersama-sama untuk menata saling ketergantungan mereka. Bagi negara-negara yang sedang berkembang dan sedang membangun, masalah-masalah pembangunan dan kesejahteraan warga negaranya yang menyangkut pada persoalan modal, teknologi, kecakapan mengelola dan mengolah sumber-sumber dan potensinya, masalah komoditi yang dihasilkannya, merupakan beberapa persoalan yang dihadapinya.¹

Usaha untuk menjembatani jurang antara negara kaya dan miskin telah dilakukan. Misalnya yang dijalankan oleh PBB dengan menyelenggarakan suatu Strategi Pembangunan Dasawarsa I dan II untuk tahun 1960-1970 dan

¹ Dalam konperensi negara-negara yang sedang berkembang di Kairo bulan Juli tahun 1962 telah dibicarakan masalah-masalah pembangunan dan masalah-masalah perekonomian mereka. Konperensi tersebut membahas masalah-masalah yang bersangkutan dengan pembangunan, kerjasama di antara negara-negara yang sedang berkembang khususnya dalam perdagangan regional dan masalah-masalah komoditi primer yang dihasilkannya. Di samping itu dibicarakan pula masalah-masalah yang berhubungan dengan perdagangan internasional, bantuan teknik dan bantuan ekonomi kepada negara-negara yang sedang berkembang (Cairo Declaration of Developing Countries; dalam Leo Mates, *op.cit.*, hal. 395-402).

1970-1980. Tetapi hasilnya boleh dikatakan tidak memadai baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dalam menanggapi masalah ini forum non-alignment mengajukan resolusi-resolusi dan deklarasi-deklarasi di bidang ekonomi melalui konperensi-konperensi yang diselenggarakannya. Tetapi yang lebih penting dari itu ialah apakah dengan mempergunakan forum non-alignment dapat dihasilkan suatu jalan ke luar yang efektif dari kesulitan-kesulitan ekonomi dan pembangunan tersebut?

Keempat perkembangan yang telah disebutkan di atas hanyalah beberapa dari perkembangan-perkembangan internasional yang terjadi. Tetapi kiranya bagi peranan forum non-alignment keempat perkembangan di atas merupakan yang terpenting untuk menentukan atau memberikan peranan forum non-alignment dalam menghadapi masalah-masalah internasional yang berkembang. Masalahnya sekarang ialah bagaimana forum non-alignment dapat memberikan sumbangan yang positif bagi perdamaian dan keamanan internasional serta peningkatan kerjasama antar bangsa dengan masuknya unsur-unsur baru dalam sistem internasional sekarang yang mempengaruhi konfigurasi kekuatan dan pengaruh dalam hubungan internasional seperti disebutkan di atas?

MENCARI PRIORITAS BARU

Adanya perkembangan-perkembangan dalam sistem internasional seperti disebutkan di atas, mengharuskan forum non-alignment mencari titik berat baru bagi peranannya, yaitu peranan yang dapat menanggapi masalah-masalah internasional yang sebenarnya amat dirasakan oleh negara-negara yang sedang membangun pada umumnya, dan negara-negara anggota forum non-alignment sendiri khususnya.

Pada waktu yang lalu perasaan "senasib" untuk membebaskan diri dari ancaman penjajahan telah memberikan bentuk pengikat bagi forum non-alignment dalam sikapnya yang anti kolonialisme dan imperialisme. Tetapi sekarang yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang membangun pada umumnya telah jauh berbeda daripada hanya sikap anti kolonialisme dan imperialisme awal dasawarsa yang lalu saja. Sebelumnya telah disinggung mengenai

masalah demokratisasi di dalam hubungan internasional yang telah dibicarakan dalam Konperensi Kairo tahun 1964 dan Konperensi Lusaka tahun 1970. Demokratisasi dalam hubungan internasional ini yang akan memberikan warna bagi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dan dicapai oleh negara-negara, khususnya yang berpartisipasi dalam forum non-alignment, karena dari sini dapat diukur apakah ia merdeka hanya dalam formalitas saja karena kemerdekaannya bertindak ditentukan atau diatur oleh negara lain atautkah ia benar-benar menikmati kemerdekaan tersebut?

Kalau misalnya demokratisasi hubungan internasional dapat diterima sebagai salah satu pemikiran tentang prioritas peranan forum non-alignment dewasa ini, maka hal ini perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi. Makna apakah yang terkandung dalam pengertian ini agar dapat memberikan "keuntungan" bagi setiap negara, baik negara yang lemah maupun negara yang kuat. Sehubungan dengan itu, kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat disumbangkan oleh forum non-alignment dalam tata hubungan internasional dewasa ini demi kepentingan bangsa-bangsa.

Dapat ditambahkan di sini bahwa demokratisasi hubungan internasional tersebut akan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan apa yang sejak semula diterima sebagai salah satu prinsip dari forum non-alignment yaitu prinsip hidup berdampingan secara damai di antara bangsa-bangsa.¹ Kiranya prinsip yang demikian ini akan tetap relevan hingga saat ini dan pada masa yang akan datang. Berdasarkan pada prinsip tersebut maka penyelesaian terhadap masalah-masalah internasional (persengketaan-persengketaan yang dapat menggawatkan perdamaian internasional misalnya) seyogyanyalah kalau diselesaikan dalam jiwa hidup berdampingan

¹"The participating countries consider that under such conditions the principles of peaceful co-existence are the only alternative to..." yang merupakan bagian dari Declaration of the Heads of State or Government of Non-aligned Countries (dalam Leo Mates; *ibid.*, hal. 387) di Beograd 1961.

secara damai di antara bangsa-bangsa. Diterimanya prinsip ini akan berarti sumbangan yang sangat berharga bagi negara-negara yang sedang membangun khususnya karena akan membantu stabilitas internasional.

Sementara itu dalam forum non-alignment kecenderungan yang terjadi ialah pembicaraan mengenai masalah-masalah ekonomi makin lama makin meningkat, khususnya kalau dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan yang terdahulu, seirama dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa pada umumnya. Menghadapi persoalan ekonomi ini, beberapa negara, antara lain Indonesia,¹ menginginkan agar forum non-alignment juga menangani masalah ekonomi khususnya ekonomi negara-negara yang sedang membangun. Akan lebih jelas lagi dalam Konperensi Kolombo tahun 1976 pidato pembukaan yang diberikan oleh PM Sri Lanka Ny. Sirimavo Bandaranaike yang mengatakan "The main task of the Third World is to destroy the present unjust and oppressive international economic system"² dalam menghadapi keadaan dewasa ini.

Yang menjadi masalah sekarang ialah apakah forum non-alignment mampu dalam membawakan peranan ekonomi seperti yang diharapkannya tersebut? Memang hampir dapat dikatakan bahwa semua anggota dalam forum non-alignment ini adalah negara-negara yang sedang membangun, dan masalah pembangunan dan perekonomiannya merupakan masalah-masalah yang mendesak. Salah satu keuntungan yang dimiliki oleh bidang ekonomi ialah tidak sepeka bidang politik, dan berdasarkan pada asumsi itu kerjasama dalam bidang ekonomi dan pembangunan akan lebih mudah diwujudkan daripada kerjasama dalam bidang politik. Langkah-langkah apa, dengan demikian, yang harus diambil oleh forum non-alignment untuk menggalakkan kerjasama ekonomi para anggotanya dan kerjasama ekonomi bangsa-bangsa pada umumnya?

¹Pidato Presiden Soeharto di III Non-Aligned Ke-III di Lusaka (Departemen Penerangan RI) hal. 18-20

²The Guardian Weekly, 22 Agustus 1976, hal. 10

Semenjak konperensi negara-negara yang sedang berkembang mengenai masalah-masalah pembangunan ekonomi yang diselenggarakan di Kairo pada tahun 1962 dan dari setiap konperensi negara-negara non-aligned sejak dari Kairo hingga Kolombo resolusi dan deklarasi ekonomi tidak ketinggalan, yang mencakup bidang yang cukup luas. Tetapi pelaksanaan dari resolusi-resolusi dan deklarasi tersebut menjadi sulit karena persoalan yang dihadapi oleh masing-masing negara berbeda-beda baik dalam materinya maupun dalam kompleksitasnya, sehingga membutuhkan prioritas-prioritas yang berbeda pula antara negara yang satu dan negara lainnya.¹ Akibatnya hal ini juga akan mempengaruhi kerjasama ekonomi yang akan dibentuk oleh forum non-alignment, yang membutuhkan pemikiran dan kesediaan yang sungguh-sungguh dari setiap negara untuk berpartisipasi.

Tetapi walaupun kerjasama tersebut masih jauh dari harapan, kiranya forum ini akan cukup berhasil kalau mampu mendorong para anggotanya sadar akan arti penting kerjasama ekonomi dan saling ketergantungan antar negara dalam masalah-masalah ekonomi khususnya. Kompleksnya masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang membangun sering menjadi perintang untuk mencapai suatu kesepakatan dalam kerjasama ekonomi sekalipun dalam lingkup regional, apalagi dalam lingkup yang sangat luas seperti dalam forum non-alignment ini. Paling tidak kalau telah terdapat kesadaran akan arti penting kerjasama ekonomi antar negara dan saling ketergantungan antar negara, jalan ke arah terwujudnya cita-cita telah dipersiapkan.

INDONESIA DALAM FORUM NON-ALIGNMENT, DULU DAN KINI

Dalam forum non-alignment ini Indonesia turut serta mengambil peranan aktif dalam memberikan sumbangannya yang positif bagi perdamaian dunia sebatas kemampuannya. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan politik luar

¹Working Paper Delegasi Indonesia pada Konperensi Puncak Non-aligned ke-IV di Algiers 1973 mengenai Regional Cooperation juga mengidentifikasikan adanya rintangan-rintangan bagi terwujudnya kerjasama regional dan integrasi ekonomi di antara negara-negara yang sedang berkembang/membangun, yang antara lain disebutkan (a) *Difference in levels of development*, (b) *similarity and competitiveness of the economies*, (c) *equitable distribution of benefits from regional integration* and (d) *fear of balance of payments difficulties*.

negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dari sejarahnya, pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah membuat para pemimpin politik Indonesia untuk menempuh suatu politik luar negeri yang tidak begitu saja mengikatkan diri kepada salah satu pihak karena pertimbangan-pertimbangan kondisi yang dihadapi oleh Indonesia.¹ Pada dasarnya kebijakan yang ditempuh oleh Indonesia tersebut adalah suatu strategi non-alignment dalam politik internasional khususnya dan dalam hubungan internasional pada umumnya.

Terlibatnya secara aktif Indonesia dalam forum non-alignment merupakan salah satu alternatif dalam rangka menghadapi konflik Barat dengan Timur pada saat itu. Dalam konteks yang demikian ini kebijakan non-alignment yang ditempuh Indonesia pada waktu itu lebih berhubungan dengan masalah-masalah ideologi dan masalah-masalah keamanan/militer, di mana di dalamnya terdapat suatu hubungan yang kaku yang dilandasi oleh fenomena ideologi. Dalam situasi yang demikian itu dibentuknya suatu forum non-alignment merupakan suatu jawaban moral terhadap tarikan ke arah polarisasi dunia yang semakin tajam, sebab kalau ini yang terjadi maka konflik-konflik akan menjadi semakin tajam dan dengan demikian akan membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Dapat dikatakan bahwa salah satu sebab yang mendorong Indonesia aktif dalam forum non-alignment ialah ketegangan atau konflik antara negara-negara besar yang dapat membahayakan keamanan dan perdamaian dunia.² Namun demikian dalam Konperensi Puncak Beograd 1961 Indonesia merupakan salah satu negara yang dikelompokkan dalam golongan yang "radikal

¹ Dalam hal ini misalnya dapat diikuti dalam Mohammad Hatta: Mendayung Antara Dua Karang (Penerbit Bulan Bintang, Jakarta 1976) khususnya mengenai Keterangan Pemerintah Tentang Politikinya Kepada Badan Pekerja K.N.I.P. tanggal 2 September 1948.

² Lihat kembali mengenai motivasi-motivasi seperti yang disebutkan di atas.

militan" yang berbeda dengan kelompok moderat.¹ (Indonesia merupakan salah satu sponsor dari gerakan non-alignment) Sebenarnya semenjak Konferensi Beograd inilah telah terjadi perbedaan paham antara Indonesia dan India mengenai konsep non-alignment dan peranan apa yang akan dijalankan.

Bahkan dalam Konferensi Puncak Kairo tahun 1964 Indonesia ~~sebenarnya~~ telah mengambil langkah yang bertentangan dengan prinsip non-alignment sendiri khususnya dalam hal hidup berdampingan secara damai di antara bangsa-bangsa. Sikap militan yang anti imperialisme dan kolonialisme telah dikembangkan dengan mengajukan konsep konfrontasi antara "new emerging forces" dan "old established forces".² Dengan mengajukan konsep demikian ini Indonesia (Sukarno) justru telah membentuk suatu blok sendiri dalam rangka memberikan sumbangan bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Sementara itu dalam perkembangan politik dan ekonomi di dalam negerinya Indonesia pada dasawarsa 1960-an mengalami periode yang gawat, yang kemudian disusul tampilnya pemerintahan Orde Baru setelah kegagalan kudeta PKI. Dihadapkan dengan situasi yang gawat di dalam negeri ini, maka antara tahun 1966 hingga 1970 boleh dikatakan Indonesia hanya menitik-beratkan pada pembenahan masalah-masalah dalam negerinya sendiri, khususnya dalam

¹ Indonesia bersama dengan Mesir dan Yugoslavia merupakan pihak-pihak yang mengundang diadakannya konferensi persiapan di Kairo pada tanggal 5 Juni 1961. Dalam Konferensi Puncak Beograd ini, yang merupakan konferensi negara-negara non-aligned yang pertama, telah terlihat adanya perbedaan pendapat antara negara-negara non-aligned. Kelompok pertama adalah negara-negara yang mengikuti garis India yang mengharapkan agar konferensi menilai situasi dunia secara realistis dan memberikan sumbangan dalam mencari jalan dan sarana untuk mengajak negara-negara besar yang telah membentuk blok-blok sendiri (Barat dan Timur) agar dapat memelihara perdamaian dunia. Kelompok lainnya adalah negara-negara yang mempergunakan konferensi sebagai manifestasi pencacimakian terhadap negara-negara barat dan menggalakan sentimen anti kolonial dalam menghadapi negara-negara Barat. Lihat dalam: *Ide Anak Agung Gde Agung; Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965* (Mouton & Co., The Hague, 1973) chapter 11 hal. 313-342.

² *Ibid.*, chapter 12

pemulihan keamanan, ketertiban dan stabilitas nasionalnya serta pembangunan kembali ekonominya yang hancur. Dalam kegiatan forum non-alignment selama periode ini Indonesia dapat disebut absen hingga diselenggarakannya konperensi puncak Lusaka tahun 1970.

Dalam Konperensi Puncak yang diselenggarakan di Lusaka tahun 1970 Indonesia, yang telah berganti pemerintahannya, turut hadir juga. Konsep pemikiran yang dikehendaki oleh Indonesia secara singkat dapat dilihat dari isi pidato Presiden Soeharto dalam konperensi tersebut.

"Satu-satunya sikap tepat yang menjiwai Konperensi negara-negara non-aligned adalah pro pada perdamaian itu sendiri. Sikap yang demikian adalah wajar dan semestinya. Kita datang kemari, bukan untuk membela atau mengutuk sesuatu negara atau blok. Kita berkumpul di sini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, mengadakan pertukaran-pikiran mengenai berbagai masalah dunia, untuk sejauh mungkin menemukan rumusan atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk penyelesaian damai dari berbagai sengketa yang ada".¹

Dari pidato Presiden tersebut jelas terlihat bahwa sikap Indonesia sudah berubah dari sikapnya ketika dalam Konperensi Puncak Kairo misalnya. Dari sikap Indonesia di Lusaka ini terlihat bahwa terhadap konflik-konflik dan ketegangan-ketegangan, negara-negara non-aligned dapat memberikan sumbang-an dalam meredakannya dengan jalan "menciptakan kondisi menuju perunding-an-perundingan" di mana "perundingan-perundingan menuju perdamaian internasional selalu menyangkut juga negara-negara besar". Ini berarti juga Indonesia menghendaki cara damai (hidup berdampingan secara damai) dalam mengatasi persoalan-persoalan internasional.

Di samping hal di atas, dalam Konperensi Lusaka itu Indonesia juga menghendaki agar forum non-alignment berperanan dalam membina kerjasama dalam masalah ekonomi dan pembangunan di antara bangsa-bangsa . khususnya para anggota forum non-alignment sendiri. Bidang ini menyangkut hubungan dengan negara-negara maju dan kerjasama dalam bidang ekonomi secara bilateral atau multilateral di antara negara-negara non-aligned sendiri agar

¹Pidato Presiden Soeharto di KTT Non-aligned Ke-III (Departemen Penerangan RI) hal. 11-12

dapat "turut serta mempercepat usaha negara-negara non-aligned untuk dapat berdiri di atas kaki sendiri".¹ Minat Indonesia dalam bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan ini semakin jelas terlihat dalam Konperensi Puncak di Aljazair dan di Kolombo baru-baru ini.

Perlu ditambahkan di sini bahwa Konperensi Puncak Lusaka merupakan penegasan kembali sikap Indonesia yang tetap non-aligned setelah mengalami periode "penyelewengan" dan ketika absen dalam kegiatan forum non-alignment yang lalu. Pidato Soeharto dalam Konperensi Puncak Lusaka ini dapat dianggap sebagai tonggak sikap Indonesia sekarang dalam menanggapi masalah-masalah internasional, baik dalam bidang politik (seperti masalah-masalah dekolonisasi, gerakan-gerakan pembebasan, hubungan dengan negara-negara besar) maupun sikapnya terhadap masalah-masalah ekonomi dan pembangunan bagi negara-negara non-aligned khususnya dan negara-negara yang sedang membangun pada umumnya. Bersamaan dengan itu Indonesia merupakan negara yang menganut garis moderat dalam menghadapi masalah-masalah internasional.

PENUTUP

Persoalan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa-bangsa selalu berkembang dan berubah. Non-alignment dipandang sebagai kebijakan politik luar negeri suatu negara, yaitu tidak mengidentifisir diri dalam kepentingan dan sasaran-sasarannya dengan suatu negara secara terus-menerus, akan tetap mempunyai arti penting dalam percaturan bangsa-bangsa. Bagaimanapun tidak dapat disangkal bahwa negara-negara yang kuat, entah dalam pengertian politik, ekonomi, militer atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, berusaha untuk mendominir negara-negara yang lebih lemah, satu dan lain hal karena alasan kepentingannya sendiri. Kalaupun hubungan konflik tidak lagi setajam pada waktu dunia di bawah sistem bipolar, dalam

¹Ibid., hal. 19-20

sistem internasional yang multipolar kemauan dari suatu negara untuk menjadi "leader" masih tetap ada. Dalam konteks yang demikian ini kebijakan non-alignment yang dijalankan oleh suatu negara masih tetap relevan, dalam pengertian untuk berperanan independen¹ di dalam sistem internasional tersebut dengan berpedoman kepada kepentingan nasional dan sasaran-sasarannya sendiri.

Dalam pengertian tersebut di atas politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif mengandung makna sebagai kebijakan untuk mewujudkan kepentingan nasional dan sasaran-sasarannya. Ia tidak mengikatkan diri kepada negara-negara besar dalam konstelasi sistem internasional sekarang. Tetapi ini tidak berarti bahwa harus ada jarak hubungan yang sama (equidistance) di dalam segala hal antara Indonesia dan negara-negara besar. Yang penting bagi Indonesia, dan negara pada umumnya, ialah terwujudnya semaksimal mungkin kepentingan dan sasaran nasionalnya dengan pengorbanan seminimal mungkin. Memang ideal kalau terdapat "equidistance" di dalam hubungan-hubungan dengan negara-negara besar, yang menjadi soal apakah dalam prakteknya "equidistance" itu dapat terwujud dengan sempurna? Yang lebih penting bukanlah "equidistance" itu, tetapi mengadakan hubungan dengan siapa yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan tanpa menjadikannya tergantung secara terus menerus pada partner di dalam hubungan tersebut.

Hingga kini dalam forum non-alignment perbedaan antara kelompok moderat dan kelompok militan radikal masih belum dapat disingkirkan sedangkan masalah-masalah internasional yang esensiil telah mengalami perubahan-perubahan. Keadaan yang demikian merupakan suatu tantangan bagi forum non-alignment sendiri untuk ikut serta memainkan peranan dalam percaturan internasional. Sedangkan untuk dapat ikut serta memainkan peranan maka arti kesatuan di dalam forum sendiri sangat penting agar apa yang diharapkan setidaknya-tidaknya menampakati pada perwujudannya. Kelihatannya hingga kini forum non-alignment belum dapat menemukan prioritas peranan yang dapat menanggapi perkembangan-perkembangan internasional, baik dalam politik

¹ K.J. Holsti, op. cit., hal. 106-111

maupun dalam ekonomi dan pembangunan bangsa-bangsa. Apakah dengan melihat pada keadaan ini Indonesia harus menarik diri dari kegiatan di dalam forum non-alignment ini?

Benar bahwa forum non-alignment ini belum dapat, untuk tidak mengatakan tidak, menunjukkan kekuatan riil yang efektif baik dalam bentuk pengaruh maupun paksaan. Masih terdapat pertimbangan lain mengapa Indonesia tidak harus meninggalkannya walaupun dari segi efektivitas masih dapat dipertanyakan secara panjang lebar. Misalnya dalam hal identitas forum sendiri, kesatuan dari para anggotanya, apa yang mendasarinya, bagaimana dengan tujuan yang ingin dicapai dalam sistem internasional sekarang ini, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau pertimbangannya adalah hal-hal seperti itu, memang masih sangat diragukan apakah forum non-alignment ini masih cukup memberikan kesempatan bagi terwujudnya kepentingan dan sasaran dari suatu negara.

Di luar itu masih terdapat pertimbangan praktis untuk tidak meninggalkan forum non-alignment ini. Pertama ialah karena forum ini dibentuk dalam suatu sistem internasional global, maka di dalamnya kita dapat melihat sikap umum dari negara-negara anggotanya dalam menghadapi konstelasi hubungan internasional. Dari sini dapat diambil manfaat bagi hal-hal mana yang perlu diperhitungkan dalam berdiplomasi dengan negara-negara tertentu mengingat heterogenitas dalam forum ini.

Kedua, karena hampir dapat dikatakan bahwa semua negara anggota forum non-alignment adalah negara-negara yang sedang berkembang dan membangun, maka semangat kesetia-kawanan di antara mereka masih diperlukan. Untuk itu forum ini masih dapat berfungsi walaupun terdapat heterogenitas di dalam keanggotaannya, karena hal ini akan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di dalam organisasi-organisasi internasional. Ternyata dalam organisasi-organisasi internasional, misalnya PBB atau UNCTAD seringkali negara-negara ini merupakan "voting power". Misalnya dalam masalah keanggotaan PBB, masalah rasialisme di Afrika Selatan, masalah Israel, masalah ekonomi, ternyata forum ini menunjukkan solidaritasnya.

Ketiga, berhubungan dengan voting dalam forum-forum atau lembaga-lembaga internasional, forum non-alignment dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan suara dalam forum atau lembaga-lembaga tersebut. Misalnya dalam kedudukan yang "merepotkan" mengenai suatu masalah kita dapat mempergunakan pertimbangan dan perbandingan suara yang datanganya dari forum non-alignment ini. Tetapi hal yang demikian ini kiranya hanya terjadi dalam masalah-masalah yang dapat dianggap sebagai masalah yang tidak prinsip yang dapat disesuaikan dengan keadaan.

Dari yang telah dikemukakan di atas kelihatan bahwa sebenarnya forum non-alignment tidak terlalu dapat diharapkan sebagai forum untuk merealisasi kepentingan nasional dan sasaran yang ingin dicapai. Namun kita harus mengamati sebanyak mungkin peristiwa-peristiwa dalam hubungan internasional, dan lewat forum ini kita dapat memberikan semacam penerangan kepada dunia luar akan maksud kita dalam ikut serta memberikan sumbangan bagi perdamaian dan keamanan internasional semampu kita.

SUATU TINJAUAN ATAS GERAKAN NON-BLOK

Kirdi DIPOYUDO

Pertemuan Puncak Non-Blok ke-V di Kolombo bulan Agustus 1976 menunjukkan bahwa gerakan non-alignment atau non-blok telah meningkat jumlah pesertanya, lebih kaya pengalaman politiknya dan lebih luas visi serta aspirasi-aspirasinya. Semua negara merdeka yang baru, tidak peduli sistem politik, sosial dan ekonominya, telah menggabungkan diri sedangkan di lain pihak tidak satu anggotapun ke luar, dan waktu belakangan ini bahkan anggota-anggota aliansi-aliansi militer berusaha mendekatinya. Kini negeri-negeri non-blok berjumlah 85 dan merupakan mayoritas di forum PBB. Selain itu, gerakan non-blok sudah bukan semata-mata suatu protes terhadap sistem yang sedang berlaku di dunia atau suatu kekuatan yang penuh dendam dan menuntut ganti rugi bagi pemerasan di masa lampau, melainkan telah menjadi suatu faktor penting dalam usaha menyelesaikan masalah-masalah internasional dalam rangka penyusunan suatu sistem baru hubungan-hubungan internasional, yang menguntungkan seluruh masyarakat dunia.

TUJUAN DAN AZAS-AZAS NON-BLOK

Untuk memahami gerakan non-blok dan menilai hasil-hasil yang dicapainya selama ini, kita hendaknya memperhatikan tujuan dan azas-azas yang menjadi landasan serta daya penggerak program politiknya. Tujuan dan azas-azas itu mulai dirumuskan pada Konperensi Afro-Asia di Bandung tahun 1955, dibatasi lebih lanjut pada Pertemuan Puncak Non-Blok yang pertama di Beograd enam tahun kemudian, dan dikembangkan sejalan dengan perkembangan doktrin dan aksi negeri-negeri non-blok, dan dikukuhkan lagi pada

konperensi-konperensi berikutnya sebagai nilai-nilai gerakan non-blok. Tujuan dan azas-azas itu merangkum tujuan dan azas-azas Piagam PBB, dan mengembangkannya lebih lanjut dengan menonjolkan unsur-unsur yang bertujuan melindungi dan memperbaiki kedudukan negeri-negeri berkembang dalam hubungan-hubungan internasional. Selanjutnya tujuan dan azas-azas itu harus dilihat sebagai suatu keseluruhan karena berkaitan satu sama lain secara erat.

Seperti dirumuskan kembali secara singkat tetapi lengkap dalam Deklarasi Politik 'Pertemuan Puncak Non-Blok ke-III di Lusaka tahun 1970, tujuan non-alignment sebagai suatu organisasi gerakan ialah: mencapai perdamaian dunia dan ko-eksistensi damai dengan memperkuat kedudukan negeri-negeri non-blok di PBB agar badan ini menjadi alat yang lebih efektif melawan segala macam tindakan agresi dan ancaman kekerasan terhadap kebebasan, kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah setiap negeri; perjuangan melawan kolonialisme dan rasialisme yang menyangkal persamaan dan martabat manusia; penyelesaian sengketa-sengketa secara damai; penghentian perlombaan senjata, disusul perlucutan senjata yang universal; perlawanan terhadap pembangunan pangkalan-pangkalan asing dan penempatan pasukan-pasukan asing di wilayah negeri-negeri lain dalam konteks konflik negara-negara besar dan penindasan kolonial maupun rasialis; universalitas PBB dan peningkatan efisiensinya; dan perjuangan bagi kemerdekaan ekonomi serta kerjasama atas dasar persamaan dan manfaat bersama.¹

Tujuan-tujuan itu berkaitan satu sama lain secara erat, sehingga kegagalan mencapai salah satu di antaranya akan membahayakan tujuan-tujuan lainnya. Dengan demikian kemerdekaan dan perkembangan terancam dalam situasi di mana proses demokratisasi hubungan-hubungan internasional dirintangi. Demikianpun kemerdekaan adalah suatu khayalan bila tiada perdamaian, perkembangan dan kemajuan dalam demokratisasi hubungan-hubungan internasional. Berdasarkan pemikiran yang sama, perdamaian

¹Disalin dari karya Leo Mates, *Non-Alignment. Theory and Current Policy* (New York, 1972), hal. 483. Dokumen-dokumen non-blok sampai dengan Pertemuan Puncak Lusaka dimuat dalam buku ini sebagai lampiran.

dunia juga tidak dapat dipelihara untuk waktu yang lama bila proses perkembangan diabaikan, kemerdekaan suatu negeri diancam, dan demokratisasi hubungan-hubungan internasional dilalaikan.

Dengan tujuan-tujuan itu berkaitan azas-azas non-alignment yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara dalam pergaulan internasional. Azas-azas itu ialah hak rakyat jajahan atas kebebasan, penentuan diri dan kemerdekaan; hormat terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara; hak semua negara atas persamaan dan partisipasi aktif dalam urusan-urusan internasional; hak semua negara yang berdaulat untuk menentukan secara bebas jalan yang akan ditempuh dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka masing-masing; hak semua rakyat atas manfaat perkembangan ekonomi dan hasil revolusi ilmu pengetahuan serta teknologi; tidak mengancam akan menggunakan kekerasan, dan azas penyelesaian sengketa-sengketa secara damai.¹

Tujuan dan azas-azas gerakan non-blok itu mengungkapkan suatu visi yang lengkap mengenai sistem baru hubungan-hubungan internasional, dan pada waktu yang sama merupakan suatu sistem nilai yang berkembang terus-menerus. Akan tetapi, berlainan dengan sistem tujuan dan azas-azas yang menetap sifatnya itu, tekanan-tekanan dan prioritas-prioritas dalam orientasi gerakan telah bergeser, dari sikap anti blok pada Pertemuan Puncak Beograd ke penekanan sistem hubungan-hubungan internasional yang berubah sekarang ini; dari isu-isu politik pada Pertemuan Beograd ke masalah-masalah ekonomi pada Konperensi Lusaka dan kemudian ke suatu perimbangan antara keduanya; dari reaksi terhadap perkembangan dunia ke prakarsa-prakarsa untuk memecahkan masalah-masalah internasional; dan dari suatu sikap yang pada pokoknya negatif terhadap situasi pada permulaan ke suatu program aksi untuk menyusun suatu tata baru dalam hubungan-hubungan internasional.

Akan tetapi, terlepas dari pergeseran tekanan dan prioritas itu, sistem tujuan dan azas-azas gerakan non-blok serta orientasi dasarnya telah memberikan suatu watak universal kepada gerakan itu. Watak universal itu menjadi semakin jelas dengan semakin banyaknya negeri yang menggabungkan diri dalam gerakan, dan semakin meningkatnya minat di kalangan

¹ Leo Mates, *op. cit.* hal. 483

negeri-negeri yang ikut dalam blok-blok. Watak universal itu juga terungkap dalam luasnya masalah-masalah internasional yang dibicarakan dengan partisipasi negeri-negeri non-blok.¹

HASIL PERJUANGAN NON-BLOK

Hasil yang dicapai gerakan non-blok selama ini adalah sangat impresif karena azas-azasnya secara berangsur-angsur dituangkan dalam dokumen-dokumen, keputusan-keputusan dan program-program PBB dan masyarakat internasional. Pertama-tama, politik non-blok telah berhasil menggalang persatuan kekuatan-kekuatan yang mendukung gerakan-gerakan pembebasan dan kemerdekaan nasional, perdamaian dunia, kemajuan dan demokrasi. Gerakan non-blok telah menjadi satu front perjuangan yang lebar melawan kolonialisme, imperialisme dan bentuk-bentuk dominasi serta pemerasan terhadap mereka yang lemah. Bahwa kekuatan-kekuatan dan negeri-negeri yang begitu berlainan satu sama lain telah mampu bertindak bersama-sama dalam bidang-bidang pokok hubungan internasional adalah suatu prestasi yang mempunyai arti sejarah.

Munculnya gerakan non-blok sebagai suatu organisasi kekuatan telah memulai suatu tahap baru di dunia. Gerakan ini telah melontarkan suatu konsep baru mengenai hubungan internasional, menggeser perimbangan kekuatan di dunia, dan tampil ke muka untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah internasional. Lagi pula gerakan non-blok ikut mempengaruhi perubahan intern negeri-negeri non-blok di bidang politik, ekonomi dan sosial, dan membuat mereka sadar akan kenyataan-kenyataan dewasa ini. Dengan demikian gerakan non-blok adalah sangat penting, tidak hanya berdasarkan apa yang telah dicapainya melainkan juga berdasarkan apa yang dicegahnya. Lahirnya gerakan ini merupakan akhir tahap hubungan internasional yang satu dan permulaan tahap yang lain. Organisasi aksinya telah melancarkan suatu gerakan global yang mendukung emansipasi dan mengetengahkan isu-isu penting dalam hubungan internasional.

¹ Lihat Bojana Tadic, "Characteristics and dilemmas of non-alignment", Review of International Affairs, 5-20 Juli 1976.

Politik non-blok telah menghasilkan suatu pengertian baru tentang perdamaian dan membuang konsep keamanan yang didasarkan atas perimbangan kekuatan militer superpower, serta menggariskan suatu pendekatan baru bagi perjuangan untuk perdamaian dengan memecahkan masalah-masalah yang timbul dari perlunya mengamankan kemerdekaan dan perkembangan bebas rakyat-rakyat, dengan mencari jalan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan perkembangan ekonomi yang berasal dari jaman kolonial, dan dengan melancarkan proses demokratisasi hubungan-hubungan internasional.

Negeri-negeri non-blok menolak pembagian dunia dalam blok-blok kekuatan atau wilayah-wilayah pengaruh yang bermusuhan, terutama karena yakin bahwa masalah-masalah dunia dewasa ini hanya dapat diselesaikan dengan usaha bersama semua negeri. Politik non-blok didasarkan atas keyakinan, bahwa masalah-masalah umat manusia tidak dapat dipecahkan oleh negeri masing-masing, melainkan hanya dengan kerjasama semua bangsa, dan sebagai bagian proses transformasi sistem internasional hubungan-hubungan ekonomi dan politik secara berangsur-angsur atas dasar persamaan dan perkembangan bebas semua bangsa.

Gerakan non-blok, berkat persatuan dan kerjasama para pesertanya atas dasar azas-azas tersebut, telah membebaskan kawasan-kawasan dari berbagai jenis dominasi dan pemerasan, dan pada waktu yang sama memperluas lapangan aksi kekuatan-kekuatan progresif dalam rangka usaha mencari jalan-jalan baru bagi pembangunan nasional, lagi pula memungkinkan negara-negara yang baru merdeka memainkan peranan aktif di dunia. Gerakan ini telah memperluas lapangan solidaritas dan kerjasama, yang juga merupakan faktor-faktor stabilitas internasional yang penting. Secara demikian gerakan non-blok telah membentuk suatu front perjuangan yang lebar untuk menciptakan sistem baru hubungan internasional.

Politik non-blok telah menuangkan kesadaran akan interdependensi bangsa-bangsa dalam suatu aksi konkrit untuk memajukan integrasi dunia atas dasar kepentingan bersama. Negeri-negeri non-blok telah mengerti bahwa koeksistensi damai tidak dapat diwujudkan lewat perundingan-perundingan negara-negara besar semata-mata, melainkan hanya lewat penyusunan suatu sistem demokrasi yang memungkinkan semua bangsa berunding

dan mengatur hubungan-hubungan mereka sebagai sesama atas dasar solidaritas yang timbul sebagai hasil penggabungan kepentingan-kepentingan semua negeri.

Sehubungan dengan sumbangan gerakan non-blok bagi pengembangan hubungan-hubungan internasional, hendaknya juga diperhatikan jasa-jasanya dalam melancarkan dan membatasi proses-proses dasar dan dalam memecahkan isyu-isyu internasional. Mengenai yang pertama, negeri-negeri non-blok tidak hanya memberikan dorongan melainkan juga ciri-ciri kepada proses-proses dalam kegiatan-kegiatan pokok mereka, yaitu aksi yang terus-menerus untuk memajukan perdamaian dan menyingkirkan sebab-sebab ketegangan, melawan agresi, pendudukan dan tekanan asing, menjamin hak atas kebebasan perkembangan ekonomi dan politik, dan berjuang untuk tata ekonomi internasional yang baru.

Negeri-negeri non-blok memulai proses detente di jaman perang dingin pada Pertemuan Puncak Beograd tahun 1961 ketika mereka melihat detente sebagai tuntutan ko-eksistensi damai, sambil menunjukkan keterbatasan-keterbatasannya. Oleh sebab itu mereka berseru agar detente diperluas ke kawasan-kawasan lain, dan menuntut agar masalah-masalah internasional yang penting dipecahkan dengan partisipasi semua negara. Mereka juga menandakan bahwa detente harus dikembangkan menuju perdamaian dunia, sambil menunjukkan bahaya-bahaya detente yang didasarkan atas perimbangan kekuatan militer dan membiarkan pusat ketegangan dan konfrontasi berpindah ke bagian dunia lain, perlombaan senjata semakin meningkat dan pemerasan terhadap dua pertiga umat manusia berlangsung terus.

Negeri-negeri non-blok menolak gagasan ko-eksistensi damai melulu sebagai suatu modus vivendi antara blok-blok. Mereka melihatnya sebagai suatu proses dinamis untuk mengatasi status quo dan mengakhiri pembagian dunia dalam blok-blok kekuatan yang bermusuhan. Mereka juga menandakan, bahwa azas-azas ko-eksistensi damai itu harus berlaku dalam hubungan antara semua negara. Selain itu mereka menandakan bahwa ko-eksistensi damai itu adalah juga suatu proses kerjasama internasional yang aktif untuk memecahkan isyu-isyu penting yang menentukan perdamaian, keamanan dan kemajuan dunia.

Gerakan non-blok juga menyatakan dukungannya bagi semua bangsa yang berjuang untuk hak-hak mereka yang sah. Rakyat Vietnam, Laos, Khmer dan negeri-negeri jajahan lain, pejoang-pejoang pembebasan nasional, kekuatan-kekuatan yang berjuang untuk hak-hak kedaulatan atas kekayaan alam mereka atau untuk kebebasan memilih sistem pembangunan mereka, semua rakyat dan kekuatan itu menemukan dalam gerakan non-alignment suatu sekutu dan alat untuk membela legitimitas perjuangan mereka. Perjuangan untuk dekolonisasi politik maupun ekonomi telah dijadikannya suatu proses permanen pembebasan dari kolonialisme, neo-kolonialisme dan monopoli-monopoli di berbagai bidang.

Sebagai suatu kekuatan yang melakukan perjuangan umat manusia untuk kemajuan dan kemerdekaan, politik non-blok telah menjadi promotor kerjasama internasional yang wajar. Dalam hal ini negeri-negeri non-blok pertama-tama didorong oleh keyakinan mereka, bahwa masalah-masalah internasional yang menentukan hanya dapat dipecahkan dengan usaha bersama seluruh masyarakat internasional. Gerakan tidak menyerah kepada hubungan-hubungan yang ada yang didasarkan atas pemerasan mereka yang lemah dan kepincangan-kepincangan lain, tetapi berjuang untuk menciptakan keadaan yang memungkinkan setiap rakyat untuk berkembang secara bebas. Kerjasama serupa itu menuntut konfrontasi dengan apa yang menghambat pembebasan nasional, karena kerjasama yang wajar hanyalah mungkin antara pihak-pihak yang merdeka dan sama kedudukannya. Dengan demikian konsep kerjasama itu menuntut suatu perubahan hubungan-hubungan yang menguntungkan mereka yang ditindas atau ditundukkan. Dengan cara ini gerakan non-blok telah memberikan sumbangannya yang berarti dalam memajukan kerjasama internasional yang wajar.¹

PERJUANGAN UNTUK TATA EKONOMI BARU

Gerakan non-blok juga berjuang di garis depan untuk mengubah sistem hubungan-hubungan ekonomi internasional, untuk menyusun tata ekonomi baru, dan untuk mengatasi jurang pemisah antara negeri-negeri maju dan

¹ Lihat Miljan Komatina, "Non-aligned helping to change international relations", *Review of International Affairs*, 5 Maret 1976.

negeri-negeri yang berkembang. Pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan perbedaan perkembangan ekonomi di dunia ini adalah salah sasaran gerakan yang pokok, khususnya sesudah Konperensi Lusaka. Gerakan menolak anggapan bahwa masalah pembangunan dapat diselesaikan dengan memberikan bantuan kepada negeri-negeri berkembang tanpa mengubah hubungan-hubungan yang pincang sekarang ini. Bagi negeri-negeri berkembang, soalnya bukanlah semata-mata menghapus kemiskinan, membayar kembali hutang-hutang, atau memperbaiki ketidak-adilan dari jaman pemerasan kolonial, tetapi memperjuangkan perubahan-perubahan yang lebih radikal dalam sistem hubungan-hubungan ekonomi dan politik di dunia, sebagai bagian perjuangan untuk memajukan keamanan, kemerdekaan dan persamaan bangsa-bangsa, dan perdamaian dunia. Dan perjuangan ini diberi prioritas utama.

Politik ini didasarkan atas tiga sikap pokok, yaitu pertama, mengandalkan swa-daya atau ketahanan nasional negeri masing-masing; kedua, memajukan solidaritas dan kerjasama antara negara-negara non-blok untuk memperkuat kedudukan mereka dan meningkatkan sumbangan mereka dalam penyusunan tata ekonomi internasional baru; dan ketiga, memajukan kerjasama dengan negara-negara maju, baik untuk membatasi pemerasan maupun untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dunia. Negeri-negeri non-blok telah meninjau kembali sikap mereka semula yang penuh dendam dan menuntut bagian dari kekayaan negara-negara maju sebagai ganti rugi. Tanpa melepaskan pendekatan ini sejauh perlu, mereka melancarkan suatu kampanye internasional untuk menyusun suatu tata ekonomi internasional baru atas dasar kedaulatan atas kekayaan alam negeri masing-masing, suatu strategi gabungan kerjasama dan saling membantu syarat-syarat perdagangan yang lebih baik bagi negeri-negeri berkembang, hubungan-hubungan baru dalam sistem moneter internasional, dan lain sebagainya. Semuanya itu dengan tujuan untuk menjamin suatu pembagian kerja baru dan pembagian kembali pendapatan dunia atas dasar industrialisasi, modernisasi pertanian, kemerdekaan di bidang teknologi dan produksi pangan di negeri-negeri berkembang. Tanpa kampanye ini, kedua sidang khusus Majelis Umum PBB tidak akan mungkin diadakan. Secara demikian gerakan non-blok mempunyai pengaruh besar atas perkembangan hubungan-

hubungan ekonomi dan politik internasional dan atas perubahan-perubahan di dalam negeri-negeri berkembang.¹

Gerakan non-blok juga berjuang di garis depan untuk meningkatkan efisiensi PBB dan sampai batas-batas tertentu telah berhasil. Berkat aksinya, organisasi dunia ini telah menjadi suatu faktor universal kerjasama yang wajar dan demokratisasi hubungan-hubungan internasional. Gerakan tidak hanya memperjuangkan agar semua negara diterima sebagai anggota PBB tetapi juga secara konsisten menandakan perlunya hubungan-hubungan baru dalam tubuhnya, perlunya suatu prosedur pengambilan keputusan yang lebih demokratis, perlunya menyesuaikan organisasi dunia ini dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia, dan perlunya melibatkan PBB dalam pemecahan masalah-masalah internasional yang penting.

Khususnya negeri-negeri non-blok melihat masalah perlucutan senjata sebagai urusan seluruh masyarakat dunia dan salah satu masalah jaman kita yang paling mendesak. Masalah ini selalu dicantumkan dalam agenda konperensi-konperensi non-blok dan dibahas berdasarkan asumsi bahwa perlucutan senjata harus merupakan hasil usaha seluruh masyarakat internasional. Tanpa menyangkal nilai perundingan-perundingan bilateral, khususnya antara kedua superpower, mereka memberikan prioritas kepada PBB sebagai forum untuk memecahkan masalah ini. Sejak Pertemuan Puncak Non-Blok di Beograd, mereka memperjuangkan perlucutan senjata sebagai isu perdamaian dan keamanan dunia yang pokok.²

KEGAGALAN DAN KELEMAHAN NON-BLOK

Akan tetapi, di samping hasil-hasil itu tercatat pula banyak kegagalan dan kelemahan yang menimbulkan rasa kecewa dan frustrasi. Sejak Pertemuan Puncak Lusaka, gerakan non-blok menandakan bahwa untuk mencapai otonomi yang lebih besar dan mendapatkan pengaruh yang lebih berarti atas sistem internasional, negeri-negeri non-blok harus memiliki swa-daya

¹ Lihat Miljan Komatina, *loc. cit.*

² Lihat Miljan Komatina, *loc. cit.*

(self-reliance) yang lebih besar dan dengan maksud itu meningkatkan kerjasama ekonomi di antara mereka sendiri. Thesis ini adalah suatu pengakuan, bahwa tidak cukup pemimpin-pemimpin non-blok bertemu secara teratur untuk saling mendengarkan dan mengeluarkan deklarasi-deklarasi, resolusi-resolusi dan program-program aksi, tetapi terutama diperlukan juga tekad yang bulat dan kemampuan untuk melaksanakannya.¹

Dalam resolusi-resolusi yang menandakan swa-daya itu juga tersirat suatu pengakuan, bahwa lambannya perkembangan di negeri-negeri berkembang tidak hanya disebabkan kesulitan-kesulitan dalam penyaluran kekayaan dari negara-negara maju ke negeri-negeri miskin, dalam penyaluran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan syarat-syarat yang wajar dan terjangkau oleh negeri-negeri berkembang, dan oleh diskriminasi sistem perdagangan internasional, melainkan juga oleh struktur-struktur politik, ekonomi dan sosial di negeri-negeri berkembang itu sendiri. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan tiga masalah. Pertama, pemusatan perhatian atas pertumbuhan ekonomi di negeri-negeri bekas jajahan, sebelum mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang modern, hanya memperkuat sektor asing secara yang merugikan sektor domestik. Kedua, bagi negeri-negeri berkembang yang miskin pengambil-alihan pola-pola dan tingkat konsumsi negeri-negeri industri yang kaya, tidak hanya mengabadikan atau bahkan meningkatkan ketergantungan pada negeri-negeri kaya melainkan juga memperlebar jurang pemisah antara kelompok elite kecil dan rakyat banyak dengan akibat-akibat sosial dan politik yang gawat. Akhirnya, perkembangan sejati tidaklah mungkin tanpa modernisasi dan demokratisasi struktur-struktur sosial politik dan tanpa penghapusan sisa-sisa hubungan-hubungan feodal dan kolonial di dalam negeri-negeri non-blok itu sendiri. Swa-daya memerlukan struktur-struktur sosial politik yang mampu menggerakkan daya rakyat yang kreatif dan produktif dan yang memungkinkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.²

¹Lihat Soedjatmoko, "Reflections on non-alignment in the 1970's", suatu prasaran pada Seminar on Non-Alignment yang diselenggarakan Indonesian Institute of International Affairs, Jakarta, 23-25 Mei 1973.

²Lihat Soedjatmoko, loc. cit.

Program gerakan non-blok, seperti tercantum dalam deklarasi-deklarasi politik dan ekonomi konperensi-konperensinya, mengungkapkan aspirasi-aspirasi umat manusia. Bertolak dari konsep ko-eksistensi damai dan kerjasama antara negara-negara dan rakyat-rakyat, tanpa membedakan ideologi dan sistem mereka, program itu memberikan kemungkinan-kemungkinan kepada semua negara untuk ikut melaksanakannya. Karena orientasi politik ini, negeri-negeri non-blok berjuang di garis depan untuk persamaan kedaulatan semua negara dan hak mereka atas kemerdekaan dan atas kebebasan perkembangan dalam negeri, dan untuk demokratisasi hubungan internasional. Selain itu, justru penggabungan usaha untuk melaksanakan azas-azas demokrasi dalam hubungan internasional dengan perjuangan melawan keterbelakangan ekonomi ini harus dilihat sebagai dasar universal dan watak global politik non-blok. Itulah juga dasar sukses gerakan non-blok sejauh ini dan perkembangannya dari Beograd via Kairo, Georgetown, Algiers, Lima dan Kolombo sampai sekarang. Dalam penggabungan itu pula terletak hari depan gerakan non-blok.¹

Akan tetapi bagaimana melaksanakan politik ini adalah soal lain. Negeri-negeri non-blok hanya merupakan satu bagian pergulatan kekuatan-kekuatan di dunia. Di dunia yang berkembang selama abad-abad, yang hanya mengakui hak mereka yang lebih kuat, politik kekuatan, dan pemerasan mereka yang lebih lemah, negeri-negeri itu, mengingat kemungkinan-kemungkinan materiil dan tingkat perkembangan mereka, barulah suatu potensi, sekalipun potensi yang besar sekali, dan dari segi politik hanya merupakan "kata-hati umat manusia" (demikian Presiden Tito). Selama ini gerakan non-blok pada pokoknya baru merupakan suatu kekuatan moral, belum menjadi kekuatan materiil yang mampu mempengaruhi arah perkembangan-perkembangan internasional ke arah tata internasional baru, di mana terdapat kerjasama bebas rakyat-rakyat merdeka dan tiada kelas atau kelompok memeras atau menindas kelas atau kelompok lain.²

¹ Lihat Milan Sahovic, "The policy of non-alignment in the changing world", suatu prasaran pada Colloquy yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute of International Affairs di Jakarta.

² Lihat Milan Sahovic, loc. cit.

PENUTUP

Dewasa ini belum ada negara besar yang mampu atau bersedia memberikan pimpinan yang diperlukan untuk menciptakan tata internasional baru yang didasarkan atas persamaan dan manfaat bersama semua rakyat. Oleh sebab itu adalah sangat penting bahwa gerakan non-blok tidak hanya terus-menerus mengukuhkan konsensus yang telah dicapai atas masalah-masalah ekstern, tetapi juga berusaha meningkatkan daya kemampuannya untuk bertindak secara efektif guna mencapai tujuan-tujuannya. Dalam konteks ini negeri-negeri non-blok harus lebih memperhatikan kelemahan-kelemahan mereka, mengembangkan cara-cara untuk mengatasinya, dan berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk melancarkan suatu aksi politik bersama. Dengan maksud itu mereka hendaknya berusaha mengembangkan solidaritas, persahabatan, kerjasama dan sikap saling menghormati antara mereka.

"Dunia, sekalipun terdapat persaingan, kebencian dan konflik-konflik intern, secara tak terhindarkan bergerak menuju kerjasama yang lebih erat dan pembangunan suatu persemakmuran dunia yang baru".¹ Dalam lahirnya dunia baru ini gerakan non-blok dapat dan akan memainkan peranan yang semakin efektif, asal dapat memperluas visinya dan mengembangkan kemampuan-kemampuan tambahan yang diperlukan.

¹ Jawaharlal Nehru, India's Foreign Policy. Selected Speeches (Delhi, 1961), hal. 3

LAMPIRAN I

DAFTAR PESERTA KONPERENSI-KONPERENSI NON-ALIGNMENT

I. BEOGRAD, YUGOSLAVIA 1-6 SEPTEMBER 1961

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 1. Afghanistan | 17. Maroko |
| 2. Aljazair | 18. Nepal |
| 3. Birma | 19. Saudi Arabia |
| 4. Kamboja | 20. Somalia |
| 5. Sri Lanka | 21. Sudan |
| 6. Kongo | 22. Tunisia |
| 7. Kuba | 23. Republik Persatuan Arab |
| 8. Cyprus | 24. Yemen |
| 9. Ethiopia | 25. Yugoslavia |
| 10. Ghana | |
| 11. Guinea | |
| 12. India | PENINJAU |
| 13. Indonesia | 1. Bolivia |
| 14. Irak | 2. Brasilia |
| 15. Lebanon | 3. Equador |
| 16. Mali | |

II. KAIRO, REPUBLIK PERSATUAN ARAB 5-10 OKTOBER 1964

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Afghanistan | 21. Republik Islam Mauritania |
| 2. Aljazair | 22. Yordania |
| 3. Angola | 23. Kenya |
| 4. Birma | 24. Kuwait |
| 5. Burundi | 25. Laos |
| 6. Kamboja | 26. Lebanon |
| 7. Kamerun | 27. Liberia |
| 8. Republik Afrika Tengah | 28. Libya |
| 9. Sri Lanka | 29. Malawi |
| 10. Chad | 30. Mali |
| 11. Kongo (Brazzaville) | 31. Marokko |
| 12. Kuba | 32. Nepal |
| 13. Cyprus | 33. Nigeria |
| 14. Dahomey | 34. Saudi Arabia |
| 15. Ethiopia | 35. Senegal |
| 16. Ghana | 36. Sierra Leone |
| 17. Guinea | 37. Somalia |
| 18. India | 38. Sudan |
| 19. Indonesia | 39. Syria |
| 20. Irak | 40. Togo |

- | | |
|--|----------------|
| 41. Tunisia | 45. Yemen |
| 42. Uganda | 46. Yugoslavia |
| 43. Republik Persatuan Arab | 47. Zambia |
| 44. Republik Kesatuan Tanganyika
dan Zansibar | |

PENINJAU

a. Negara

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Argentina | 9. Uruguay |
| 2. Bolivia | 10. Venezuela |
| 3. Brasilia | |
| 4. Chili | |
| 5. Finlandia | |
| 6. Yamaika | |
| 7. Meksiko | |
| 8. Trinidad dan Tobago | |

b. Organisasi

1. Sekretaris Jenderal Organisasi
Kesatuan Afrika (Sekjen OAU)
2. Sekretaris Jenderal Liga Arab

III. LUSAKA, ZAMBIA 8-10 SEPTEMBER 1970

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Afghanistan | 27. Leshoto |
| 2. Aljazair | 28. Liberia |
| 3. Botswana | 29. Libya |
| 4. Burundi | 30. Malaysia |
| 5. Kamerun | 31. Mali |
| 6. Republik Afrika Tengah | 32. Mauritania |
| 7. Sri Lanka | 33. Marokko |
| 8. Chad | 34. Nepal |
| 9. Kongo (Brazzaville) | 35. Nigeria |
| 10. Kongo (Kinshasa) | 36. Ruanda |
| 11. Kuba | 37. Senegal |
| 12. Cyprus | 38. Sierra Leone |
| 13. Equatorial Guinea | 39. Somalia |
| 14. Ethiopia | 40. Yemen Selatan |
| 15. Ghana | 41. Singapura |
| 16. Guinea | 42. Sudan |
| 17. Guyana | 43. Swaziland |
| 18. India | 44. Syria |
| 19. Indonesia | 45. Tanzania |
| 20. Irak | 46. Trinidad dan Tobago |
| 21. Yamaika | 47. Togo |
| 22. Yordania | 48. Tunisia |
| 23. Kenya | 49. Uganda |
| 24. Kuwait | 50. Republik Persatuan Arab |
| 25. Laos | 51. Republik Arab Yemen |
| 26. Lebanon | 52. Yugoslavia |
| | 53. Zambia |

PENINJAU

a. Negara

1. Argentina
2. Austria
3. Barbados
4. Bolivia
5. Brasilia
6. Chili
7. Equador
8. Finlandia
9. Peru
10. Pemerintah Sementara
Republik Vietnam Selatan
11. Uruguay

12. Venezuela

b. Organisasi

1. African National Congress
(ANC - Afrika Selatan)
2. Afro-Asian People's
Solidarity Organization
3. Frelimo (Mozambik)
4. Pan African Congress
5. MPLA (Angola)
6. UNITA (Angola)

IV. ALGIERS, ALJAZAIR 5-9 SEPTEMBER 1973

1. Afghanistan
2. Aljazair
3. Argentina
4. Bangla Desh
5. Bahrain
6. Bhutan
7. Botswana
8. Birma
9. Burundi
10. Kamboja
11. Kamerun
12. Republik Afrika Tengah
13. Chad
14. Chili
15. Kongo
16. Kuba
17. Cyprus
18. Dahomey
19. Republik Arab Mesir
20. Equatorial Guinea
21. Ethiopia
22. Gabon
23. Gambia
24. Ghana
25. Guinea
26. Guyana
27. India
28. Indonesia
29. Irak
30. Ivory Coast
31. Yamaika
32. Yordania

33. Kenya
34. Kuwait
35. Laos
36. Lebanon
37. Lesotho
38. Liberia
39. Libya
40. Madagaskar
41. Malaysia
42. Mali
43. Malta
44. Mauritania
45. Mauritius
46. Marokko
47. Nepal
48. Niger
49. Nigeria
50. Oman
51. Peru
52. Qatar
53. Ruanda
54. Saudi Arabia
55. Senegal
56. Sierra Leone
57. Singapura
58. Somalia
59. Pemerintahan Sementara
Vietnam Selatan
60. Sri Lanka
61. Sudan
62. Swaziland
63. Syria

- 64. Tanzania
- 65. Togo
- 66. Trinidad dan Tobago
- 67. Tunisia
- 68. Uganda
- 69. Uni Emirat Arab

- 70. Upper Volta
- 71. Republik Arab Yemen
- 72. Republik Demokrasi Rakyat Yemen
- 73. Yugoslavia
- 74. Zaire
- 75. Zambia

PENINJAU

a. Negara

- 1. Barbados
- 2. Bolivia
- 3. Brasilia
- 4. Equador
- 5. Meksiko

- 6. Panama
- 7. Uruguay
- 8. Venezuela
- 9. Angola

b. Organisasi

- 1. MPLA (Angola)
- 2. FNLA (Angola)
- 3. PAIGC (Guinea Bissau)
- 4. Frelimo (Mozambik)
- 5. CLP Sao Tome (Sao Tome dan Principe)
- 6. ZAPU dan ZANU (Zimbabwe)
- 7. ANC dan PAC (Afrika Selatan)
- 8. SWAPO (Namibia)
- 9. SPUF (Seychelles Island)
- 10. MOLINACO (COMOROS)
- 11. FLCS dan MLD (Somalia)
- 12. PLO

- 13. Partai Sosialis Puerto Rico
- 14. Organisasi Persatuan Afrika (OAU)
- 15. Liga Arab
- 16. Afro-Asian People's Solidarity Organization

Sebagai Tamu

- 1. Austria
- 2. Finlandia
- 3. Swedia

V. KOLOMBO, SRI LANKA 16-19 AGUSTUS 1976

- 1. Afghanistan
- 2. Aljazair
- 3. Angola
- 4. Argentina
- 5. Bahrain
- 6. Bangla Desh
- 7. Benin
- 8. Bhutan
- 9. Botswana
- 10. Birma
- 11. Burundi
- 12. Republik Kesatuan Kamerun
- 13. Cape Verde
- 14. Republik Afrika Tengah
- 15. Chad
- 16. Comoros

- 17. Kongo
- 18. Kuba
- 19. Cyprus
- 20. Republik Demokrasi Kampuchea
- 21. Republik Arab Mesir
- 22. Equatorial Guinea
- 23. Ethiopia
- 24. Gabon
- 25. Gambia
- 26. Ghana
- 27. Guinea
- 28. Guinea Bissau
- 29. Guyana
- 30. India
- 31. Indonesia
- 32. Irak

- | | |
|--|--|
| 33. Ivory Coast | 81. Republik Arab Yemen |
| 34. Yamaika | 82. Republik Demokrasi Rakyat Yemen |
| 35. Yordania | 83. Yugoslavia |
| 36. Kenya | 84. Zaire |
| 37. Republik Demokrasi Rakyat Korea | 85. Zambia |
| 38. Kuwait | Status Istimewa |
| 39. Republik Demokrasi Rakyat Laos | 1. Belize |
| 40. Lebanon | PENINJAU |
| 41. Lesotho | a. Negara |
| 42. Liberia | 1. Barbados |
| 43. Republik Arab Lybia | 2. Bolivia |
| 44. Madagaskar | 3. Equador |
| 45. Malaysia | 4. El Salvador |
| 46. Mali | 5. Grenada |
| 47. Malta | 6. Meksiko |
| 48. Mauritania | 7. Uruguay |
| 49. Mauritius | 8. Venezuela |
| 50. Marokko | b. Organisasi |
| 51. Mozambik | 1. African National Congress (Afrika Selatan) |
| 52. Nepal | 2. Pan Africa 1st Congress of Azania |
| 53. Niger | 3. Partai Sosialis Puerto Rico |
| 54. Nigeria | 4. PBB |
| 55. Oman | 5. Organisasi Persatuan Afrika (OAU) |
| 56. PLO | 6. Liga Arab |
| 57. Panama | 7. Afro-Asian People's Solidarity Organization |
| 58. Peru | 8. African National Council of Zimbabwe |
| 59. Qatar | 9. Djibouti Liberation Movement |
| 60. Republik Maladiva | 10. South West African People's Organization |
| 61. Ruanda | 11. Somali Coast Liberation Front |
| 62. Republik Demokrasi Sao Tome dan Principe | 12. Secretary General Islamic Conference |
| 63. Saudi Arabia | Sebagai Tamu |
| 64. Senegal | 1. Austria |
| 65. Seychelles | 2. Finlandia |
| 66. Sierra Leone | 3. Pilipina |
| 67. Singapura | 4. Portugal |
| 68. Somalia | 5. Rumania |
| 69. Sri Lanka | 6. Swedia |
| 70. Sudan | 7. Swiss |
| 71. Swaziland | |
| 72. Republik Arab Syria | |
| 73. Republik Kesatuan Tanzania | |
| 74. Togo | |
| 75. Trinidad dan Tobago | |
| 76. Tunisia | |
| 77. Uganda | |
| 78. Uni Emirat Arab | |
| 79. Upper Volta | |
| 80. Republik Sosialis Vietnam | |

LAMPIRAN II

COMMUNIQUE OF THE BANDUNG CONFERENCE,
APRIL 18-24, 1955

The Asian-African Conference, convened by the Governments of Burma, Ceylon, India, Indonesia and Pakistan, met in Bandung from the 18th to 24th of April, 1955.

In addition to the sponsoring countries, the following twenty-four countries participated in the conference:

Afghanistan, Cambodia, the People's Republic of China, Egypt, Ethiopia, the Gold Coast, Iran, Iraq, Japan, Jordan, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, the Philippines, Saudi Arabia, the Sudan, Syria, Thailand, Turkey, the Democratic Republic of (North) Vietnam, the State of Vietnam and Yemen.

The Asian-African Conference considered the position of Asia and Africa and discussed ways and means by which their peoples could achieve the fullest economic, cultural and political cooperation.

A. Economic cooperation

1. The Asian-African Conference recognized the urgency of promoting economic development in the Asian-African region. There was general desire for economic cooperation among the participating countries on the basis of mutual interest and respect for national sovereignty.

The proposals with regard to economic cooperation within the participating countries do not preclude either the desirability or the need for cooperation with countries outside the region, including the investment of foreign capital.

It was further recognized that assistance being received by certain participating countries from outside the region through international or under bilateral arrangements had made a valuable contribution to the implementation of their development programs.

2. The participating countries agreed to provide technical assistance to one another to the maximum extent practicable, in the form of:

Experts, trainees, pilot projects and equipment for demonstration purposes, exchange of know-how, and establishment of national and, where possible, regional training and research institutes for imparting technical knowledge and skills in cooperation with the existing international agencies.

3. The Asian-African Conference recommended:

The early establishment of a special United Nations fund for economic development;

The allocation by the International Bank for Reconstruction and Development of a greater part of its resources to Asian-African countries;

The early establishment of an international finance corporation, which should include in its activities the undertaking of equity investment; and

Encouragement of the promotion of joint ventures among Asian-African countries insofar as this will promote their common interest.

4. The Asian-African Conference recognized the vital need for stabilizing commodity trade in the region.

The principle of enlarging the scope of multilateral trade and payments was accepted. However, it was recognized that some countries would have to take recourse to bilateral trade arrangements in view of their prevailing economic conditions.

5. The Asian-African Conference recommended that collective action be taken by participating countries for stabilizing international prices of and demand for primary commodities through bilateral and multilateral arrangements, and that as far as practicable and desirable they should

adopt a unified approach on the subject in the United Nations Permanent Advisory Commission on International Commodity Trade and other international forums.

6. The Asian-African Conference further recommended:

Asian-African countries should diversify their export trade by processing their raw materials whenever economically feasible before export; intra-regional trade fairs should be promoted and encouragement be given to the exchange of trade delegations and groups of businessmen; exchange of information and of samples should be encouraged with a view to promoting intra-regional trade; and normal facilities should be provided for the transit trade of landlocked countries.

7. The Asian-African Conference attached considerable importance to shipping and expressed concern that shipping lines reviewed from time to time their freight rates, which are often to the detriment of participating countries. It recommended a study of this problem and collective action thereafter to induce the shipping lines to adopt a more reasonable attitude. It was further suggested that a study of railway freight of transit trade may be made.

8. The Asian-African Conference agreed that encouragement should be given to the establishment of national and regional banks and insurance companies.

9. The Asian-African Conference felt that exchange of information on matters relating to oil, such as remittance of profits and taxation, might eventually lead to the formulation of a common policy.

10. The Asian-African Conference emphasized the particular significance of the development of nuclear energy for peaceful purposes for Asian-African countries.

The Conference welcomed the initiative of the powers principally concerned in offering to make available information regarding the use of atomic energy for peaceful purposes; urged the speedy establishment of an international atomic energy agency which should provide for adequate representation of the Asian-African countries on the executive

authority of the agency; and recommended that Asian and African governments take full advantage of the training and other facilities in the peaceful uses of atomic energy offered by the countries sponsoring such programs.

11. The Asian-African Conference agreed to the appointment of liaison officers in participating countries, to be nominated by their respective national governments, for the exchange of information and ideas on matters of mutual interest.

It recommended that fuller use should be made of the existing international organizations, and participating countries who were not members of such international organizations, but were eligible, should secure membership.

12. The Asian-African Conference recommended that there should be prior consultation of participating countries in international forums with a view, as far as possible, to furthering their mutual economic interest. It is, however, not intended to form a regional bloc.

B. Cultural cooperation

1. The Asian-African Conference was convinced that among the most powerful means of promoting understanding among nations is the development of cultural cooperation. Asia and Africa have been the cradle of great religions and civilizations, which have enriched other cultures and civilizations while themselves being enriched in the process.

Thus the cultures of Asia and Africa are based on spiritual and universal foundations. Unfortunately, cultural contacts among Asian and African countries were interrupted during the past centuries.

The peoples of Asia and Africa are now animated by a keen and sincere desire to renew their old cultural contacts and develop new ones in the context of the modern world. All participating governments at the Asian-African Conference reiterated their determination to work for closer cultural cooperation.

2. The Asian-African Conference took note of the fact that the existence of colonialism in many parts of Asia and Africa, in whatever form it may be, not only prevents cultural cooperation but also suppresses the national cultures of the peoples.

Some colonial powers have denied their dependent people basic rights in the sphere of education and culture, which hampers the development of their personality and also prevents cultural intercourse with other Asian and African peoples.

This is particularly true in the case of Tunisia, Algeria and Morocco, where the basic right of the people to study their own language and culture has been suppressed.

Similar discrimination has been practiced against Asian and colored peoples in some parts of the Continent of Africa.

The Conference felt that these policies amount to a denial of the fundamental rights of man, impede cultural advancement in this region and also hamper cultural cooperation on the wider international plane. The Conference condemned such a denial of fundamental rights in the sphere of education and culture in some parts of Asia and Africa by this and other forms of cultural suppression. In particular, the Conference condemned racialism as a means of cultural suppression.

3. It was not from any sense of exclusiveness or rivalry with other groups of nations and other civilizations and cultures that the Conference viewed the development of cultural cooperation among Asian and African countries.

True to the age-old tradition of tolerance and universality, the Conference believed that Asian and African cultural cooperation should be developed in the larger context of world cooperation. Side by side with the development of Asian-African cultural cooperation, the countries of Asia and Africa desire to develop cultural contacts with others. This would enrich their own culture and would also help in the promotion of world peace and understanding.

4. There are many countries in Asia and Africa which have not yet been able to develop their educational, scientific and technical institutions. The Conference recommended that countries in Asia and Africa which are more fortunately placed in this respect should give facilities for the admission of students and trainees from such countries to their institutions. Such facilities should also be made available to the Asian and African people in Africa, to whom opportunities for acquiring higher education are at present denied.

5. The Asian-African Conference felt that the promotion of cultural cooperation among countries of Asia and Africa should be directed towards:

First, the acquisition of knowledge of each other's country;

Second, mutual cultural exchange; and

Third, exchange of information.

6. The Asian-African Conference was of the opinion that at this stage the best results in cultural cooperation would be achieved by pursuing bilateral arrangements to implement its recommendations and by each country taking action on its own wherever possible and feasible.

C. Human rights and self-determination

1. The Asian-African Conference declared its full support of the fundamental principles of human rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations. The Conference declared its full support of the principle of self-determination of peoples and nations as set forth in the Charter of the United Nations and took note of the United Nations resolutions on the right of peoples and nations to self-determination, which is a prerequisite of the full enjoyment of all fundamental human rights.

2. The Asian-African Conference deplored the policies and practices of racial segregation and discrimination which form the basis of government and human relations in large regions of Africa and in other parts of the world. Such conduct is not only a gross violation of human rights, but also a denial of the fundamental value of civilization and the dignity of man.

The Conference extended its warm sympathy and support for the courageous stand taken by the victims of racial discrimination and especially by the peoples of African and Indian and Pakistani origin in South Africa; applauded all those who sustained their cause; reaffirmed the determination of Asian-African peoples to eradicate every trace of racialism that might exist in their own countries, and pledged to use its full moral influence to guard against the danger of falling victims to the same evil in their struggle to eradicate it.

D. Problems of dependent people

1. The Asian-African Conference discussed the problems of dependent peoples and colonialism and the evils arising from subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation. The Conference agreed:

First, in declaring that colonialism in all its manifestations is an evil which should speedily be brought to an end;

Second, in affirming that the subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a denial of fundamental human rights, is contrary to the Charter of the United Nations and is an impediment to the promotion of world peace and cooperation;

Third, in declaring its support of the cause of freedom and independence for all such peoples; and

Fourth, in calling upon the powers concerned to grant freedom and independence to such peoples.

2. In view of the unsettled situation in North Africa and of the persisting denial to the peoples of North Africa of their right to self-determination, the Asian-African Conference declared its support of the rights of the people of Algeria, Morocco and Tunisia to self-determination and independence and urged the French Government to bring about a peaceful settlement of the issue without delay.

E. Other problems

1. In view of the existing tension in the Middle East caused by the situation in Palestine and of the danger of that tension to world peace, the Asian-African Conference declared its support of the rights of the Arab people of Palestine, and called for the implementation of the United Nations resolutions on Palestine and of the peaceful settlement of the Palestine question.

2. The Asian-African Conference, in the context of its expressed attitude on the abolition of colonialism, supported the position of Indonesia in the case of West Iran, based on the relevant agreements between Indonesia and the Netherlands. The Asian-African Conference urged the Netherlands Government to reopen negotiations as soon as possible to implement their obligations under the above-mentioned agreements and expressed the earnest hope that the United Nations could assist the parties concerned in finding a peaceful solution to the dispute.

3. The Asian-African Conference supported the position of Yemen in the case of Aden and the southern parts of Yemen known as the protectorates, and urged the parties concerned to arrive at a peaceful settlement of the dispute.

F. Promotion of world peace and cooperation

1. The Asian-African Conference, taking note of the fact that several states have still not been admitted to the United Nations, considered that, for effective cooperation for world peace, membership in the United Nations should be universal, called on the Security Council to support the admission of all states which are qualified for membership in terms of the Charter.

In the opinion of the Asian-African Conference the following among the participating countries which were represented in it — Cambodia, Ceylon, Japan, Jordan, Laos, Lybia, Nepal and a unified Vietnam — were so qualified.

The Conference considered that the representation of the countries of the Asian-African region on the Security Council in relation to the principle of equitable geographical distribution was inadequate. It expressed the view that, as regards the distribution of the non-permanent seats, the Asian-African countries which, under the arrangement arrived at in London in 1946, are precluded from being elected, should be enabled to serve on the Security Council so that they might make a more effective contribution to the maintenance of international peace and security.

2. The Asian-African Conference having considered the dangerous situation of international tension existing and the risks confronting the whole human race from the outbreak of global war in which the destructive power of all types of armaments, including nuclear and thermonuclear weapons, would be employed, invited the attention of all nations to the terrible consequences that would follow if such a war were to break out.

The Conference considered that disarmament and the prohibition of production, experimentation and use of nuclear and thermonuclear weapons of war are imperative to save mankind and civilization from the fear and prospect of wholesale destruction. It considered that the nations of Asia and Africa assembled here have duty toward humanity and civilization to proclaim their support for the prohibition of these weapons and to appeal to nations principally concerned and to world opinion to bring about such disarmament and prohibition.

The Conference considered that effective international control should be established and maintained to implement such prohibition and that speedy and determined efforts should be made to this end. Pending the total prohibition of the manufacture of nuclear and thermonuclear weapons, this Conference appealed to all powers concerned to reach agreements to suspend experiments with such weapons.

The Conference declared that universal disarmament is an absolute necessity for the preservation of peace and requested the United Nations to continue its efforts and appealed to all concerned speedily to bring about the regulation, limitation, control and reduction of all armed

forces and armaments, including the prohibition of the production, experimentation, and use of all weapons of mass destruction, and to establish effective international control to this end.

3. The Asian-African Conference gave anxious thought to the question of world peace and cooperation. It viewed with deep concern the present state of international tension with its danger of an atomic world war.

The problem of peace is correlative with the problem of international security. In this connection all states should cooperate especially through the United Nations in bringing about the reduction of armaments and the elimination of nuclear weapons under effective international control. In this way international peace can be promoted and nuclear energy may be used exclusively for peaceful purposes. This would help answer the needs, particularly of Asia and Africa, for what they urgently require are social progress and better standards of life in larger freedom.

Freedom and peace are interdependent. The right of self-determination must be enjoyed by all peoples in freedom, and independence must be granted with the least possible delay to those who are still dependent peoples. Indeed all nations should have the right freely to choose their own political and economic systems and their own way of life in conformity with the purposes and principles of the Charter of the United Nations.

Free from distrust and fear and with confidence and goodwill toward each other, nations should practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors and develop friendly cooperation on the basis of the following principles:

1. Respect for fundamental human rights and for the purposes and principles of the Charter of the United Nations.

2. Respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations.

3. Recognition of the equality of all races and of the equality of all nations, large and small.

4. Abstention from intervention or interference in the internal affairs of another country.

5. Respect for the right of each nation to defend itself singly or collectively in conformity with the Charter of the United Nations.

6. a. Abstention from the use of arrangements of collective defense to serve the particular interests of any of the big powers. b. Abstention by any country from exerting pressures on other countries.

7. Refraining from acts or threats of aggression or the use of force against the territorial integrity or political independence of any country.

8. Settlement of all international disputes by peaceful means such as negotiation, conciliation, arbitration, or judicial settlement, as well as other peaceful means of the parties' own choice in conformity with the Charter of the United Nations.

9. Promotion of mutual interest and cooperation.

10. Respect for justice and international obligations.

The Asian-African Conference declares its conviction that friendly co-operation in accordance with these principles would effectively contribute to the maintenance and promotion of international peace and security, while cooperation in the economic, social and cultural field would help bring about the common prosperity and well-being of all.

The Asian-African Conference recommended that the five sponsoring countries consider the convening of the next meeting of the Conference in consultation with the participating countries.

LAMPIRAN III

KRITERIA PARTISIPASI DALAM KONPERENSI NEGARA-NEGARA NON-BLOK MENURUT KONPERENSI PERTAMA DI BEOGRAD 1961

1. The country should have adopted an independence policy based on the co-existence of States with different political and social system and on non-alignment, or be showing a trend in favour of such policy.
2. The country concerned should be consistently supporting the movement for National Independence.
3. The country should not be a member of a multilateral military alliance concluded in the context of Great Power conflicts.
4. If a country has a bilateral military agreement with a Great Power or is a member of a regional defence pact, the agreement or pact should not be one deliberately, concluded in the context of Great Power conflicts.
5. If it has conceded military bases to a foreign Power, the concession not have been made in the context of Great Power conflicts.